**LAPORAN MANAJEMEN**

**TRIWULAN ....../20X4**

**BAB I. Pendahuluan**

* 1. **Kondisi Umum**

Harga jual rata-rata komoditi karet sampai dengan Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. ………/kg atau berada dibawah RKAP sebesar Rp………/kg atau ………%, namun harga jual rata-rata kelapa sawit mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp. ………/kg atau ………%, sehingga kontribusi total hasil penjualan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) (induk perusahaan) mencapai Rp. ……… milyar atau berada diatas RKAP sebesar Rp. ……… milyar atau ………%.

Upaya efisiensi tetap dilakukan tanpa mengurangi kultur teknis tanaman sehingga memberikan dampak terhadap penurunan biaya produksi, disisi lain tingkat kehilangan produksi di lapangan berangsur menurun, namun penggarapan lahan oleh rakyat masih merupakan ancaman yang senantiasa harus di waspadai.

**1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan**

Sampai dengan Triwulan ....../20x4, PT Perkebunan Nusantara .... dan Entitas Anak (Konsolidasi) menghasilkan laba sebelum PPh sebesar Rp. ……… juta dibandingkan s/d Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. ……… juta mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp. ………juta atau ………% dan dibandingkan dengan RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. ………juta, berada diatas sebesar Rp. ………juta atau ………%.

Hasil penjualan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) (Induk Perusahaan) s/d Triwulan ....../20x4 mencapai Rp. ………juta, yang terdiri dari hasil penjualan ekspor sebesar ……… juta atau ………% dari total hasil penjualan dan hasil penjualan lokal sebesar ……… juta atau ………% dari total hasil penjualan,.

Laporan posisi keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak (Konsolidasi) per ……… 20x4 ditutup dengan total Aset dan Liabilitas/Ekuitas sebesar Rp. ……… milyar, dibanding RKAP per ………20x4 sebesar Rp. ……… milyar berada diatas Rp. ……… milyar atau ………% dan dibanding per ……… 20x3 sebesar Rp. ……… milyar mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp. ……… milyar atau ………%.

Penilaian kinerja perusahaan s/d Triwulan ………/20x4 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 dan Keputusan RUPS PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014, tanggal 24 Desember 2013, adalah Sehat – AA (Double A) dengan rincian :

1. Nilai Skor Aspek Keuangan = 64,50

2. Nilai Skor Aspek Operasional = 12,60

3. Nilai Skor Aspek Administrasi = 15,00

= 92,10

**BAB II. Kinerja Perusahaan**

**2.1. Aspek Penjualan**

Total nilai penjualan s/d Triwulan ………/20x4 PT. Perkebunan Nusantara III (Induk Perusahaan) mencapai Rp. ……… juta dibanding RKAP s/d Triwulan ………20x4 berada diatas sebesar Rp. ……… juta atau ………% (RKAP s/d Triwulan ………/20x4 sebesar Rp. ……… juta), hal ini disebabkan Realisasi harga jual rata-rata Kelapa Sawit s/d Triwulan ………/20x4 berada diatas RKAP s/d Triwulan ………/20x4 sebesar Rp. ………9/kg atau ………%.

2.1.1. Prospek Pasar

a. Karet

* Pemerintah militer Thailand telah menjual setengah dari 200.000 ton stok persediaan karetnya namun menunda penjualannya dari stok persediaan karet yang tersisa sebanyak 100.000 ton untuk menghindari harga lebih rendah.
* Pemerintah Thailand telah menyetujui 30 miliar baht ($ 931.000.000) dalam bentuk pinjaman lunak untuk membantu koperasi dan perusahaan lokal untuk membeli karet dari petani dalam upaya untuk mengangkat harga komoditas, yang berada di posisi terendah karena permintaan global yang lemah.
* Melemahnya permintaan China berpengaruh cukup kuat akan potensi pelemahan permintaan karet global, selain faktor potensi pelemahan perekonomian China yang direvisi oleh IMF dari 7,6% ke 7,4%, harga karet juga cukup tertekan oleh kembalinya melemahnya harga minyak mentah global.
* Pasokan karet alam dunia diperkirakan akan melampaui permintaan dengan 241.000 ton pada tahun 2014, menurut 1 RSG, turun dari surplus 384.000 ton tahun lalu. Surplus bisa berkurang sebanyak 183.000 ton pada tahun 2015.
* Stok karet alam global diperkirakan naik sekitar 10 persen menjadi 3,21 juta ton pada akhir tahun 2014, menurut International Rubber Study Group, sekitar 27 persen dari output global. Stok di Thailand, Indonesia dan Malaysia diperkirakan oleh Asosiasi Negara Produsen Karet Alam sekitar 715.000 ton.
* Menurut Association of Natural Rubber Producing, pergerakan harga karet masih tersupport oleh penurunan output karet global dan India memberikan sentimen positif seiring data yang menyebutkan adanya penurunan output karet global sebesar 1,7% dari Januari hingga Agustus tahun 2014, sementara dari India, output India turun hingga 26% pada periode Agustus 2014.
* Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, sentimen pasar global, pergerakan harga karet masih relatif buruk secara fundamental, hal tersebut dilandasi oleh posisi ekspektasi demand dan supply global yang buruk bagi pergerakan harga, dari sisi demand lesunya perekonomian China membuat potensi penurunan demand global, sementara dari sisi supply akan meningkatnya penjualan di Thailand pasca penambahan 100.000 ton ke level 108.000 ton berpotensi semakin mengakibatkan penumpukan karet di pasar global

b. Kelapa Sawit

* Menurut analis Thomas Mielke harga ekspor minyak kelapa sawit pada produsen terbesar dunia Indonesia dapat naik menjadi $ 730- $ 750 per ton pada bulan Januari - Maret 2015 dari $ 680 per ton saat ini karena melambatnya pertumbuhan produksi.
* Menurut Thomas Mielke editor Oil World berbasis di Hamburg, mengatakan hasil Konferensi Industri Globoil di India daerah pertumbuhan minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia menderita kekeringan. Jika kita mendapatkan kelanjutan dari kekeringan pada bulan Oktober, akan mengurangi jumlah tandan buah sawit dalam beberapa bulan mendatang.
* Menurut analis Thomas Mielke harga soyoil di Argentina kemungkinan akan diperdagangkan di kisaran $ 820- $ 850 per ton pada bulan Januari - Maret dari $775 per ton dan saat ini permintaan soyoil meningkat terutama untuk bahan industri biodiesel.
* Menurut analis berbasis di London harga minyak kelapa sawit akan naik ke 2,350 ringgit, dengan mengasumsikan harga minyak Brent Crude akan turun menjadi $ 90 per barel sampai bulan Februari. Minyak Brent Crude saat ini sekitar $97 per barel, setelah mencapai level terendah dua tahun $ 95,60. Jika minyak mentah Brent Crude turun menjadi $ 85 per barel, maka harga minyak kelapa sawit dapat diperdagangkan sekitar 2.225 ringgit per ton pada bulan Februari 2015.
* Indonesia, akan menghapus pajak ekspor minyak kelapa sawit untuk bulan Oktober, menyusul langkah serupa oleh Malaysia bertujuan untuk meningkatkan penjualan ekspor di tengah melemahnya permintaan.
* Impor minyak sawit India cenderung naik sekitar 4 persen menjadi 8,25 juta ton pada tahun pemasaran yang dimulai pada bulan November 2014 setelah musim kering mengurangi pertumbuhan pasokan minyak lokal di tengah ...(kenaikan/penurunan)... konsumsi.
* Meningkatnya pembelian oleh India, importir top dunia dari minyak goreng, dapat mendukung harga di pasar berjangka minyak sawit Malaysia yang mencapai titik terendah dalam lima tahun awal bulan September dan hampir seperlima dari nilai sejauh tahun 2014, hampir 60 persen dari permintaan minyak nabati tahunan India dipenuhi oleh impor, terutama minyak sawit bersumber dari Indonesia dan Malaysia.
* Produksi minyak nabati negara Asia Selatan kemungkinan akan meningkat sebesar 2,1 persen menjadi 7,2 juta ton pada tahun 2014/2015.

2.1.2. Penjualan

a. Karet

Perkembangan volume penjualan komoditi karet s/d Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 dapat diuraikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran : 3/1-2

Realisasi volume penjualan karet Triwulan ....../20X4 dibandingkan RKAP tahun 2014 mencapai 22,42%, dibanding RKAP Triwulan ....../20X4 berada dibawah sebesar 1.699 ton atau 15,56% dan dibanding realisasi Triwulan ....../20X3 mengalami penurunan sebesar 784 ton atau 7,84%.

Realisasi volume penjualan karet s/d Triwulan ....../20X4 dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20X3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar 524 ton atau 1,97% dan dibanding RKAP s/d Triwulan ....../20X4 berada dibawah sebesar 1.136 ton atau 4,03%, hal ini disebabkan produksi karet kebun sendiri dan pembelian produksi karet pihak ketiga berada dibawah RKAP masing-masing sebesar 357 ton atau 1,43% dan 2.595 ton atau 79,53%.

b. Kelapa Sawit

Perkembangan volume penjualan komoditi kelapa sawit s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 dapat diuraikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran ………

Realisasi volume penjualan kelapa sawit Triwulan ....../20x4 dibandingkan dengan RKAP tahun 20x4 mencapai ……..%, dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar …….. ton atau ……..% dan dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami penurunan sebesar …….. ton atau ……..%.

Realisasi volume penjualan kelapa sawit s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 mengalami penurunan sebesar …….. ton atau ……..% dan dibanding RKAP s/d Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar …….. ton atau ……..%, hal ini disebabkan produksi minyak sawit dan inti sawit (MS + IS) kebun sendiri dan pembelian produksi pihak III berada dibawah RKAP masing-masing sebesar ……..ton atau ……..% dan ……..ton atau ……..%.

2.1.3. Nilai Penjualan

Perkembangan Nilai Penjualan Komoditi Karet dan Kelapa Sawit yang dihasilkan perusahaan s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 diuraikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran ……….

Realisasi total nilai penjualan ekspor dan lokal Triwulan ....../20x4 dibandingkan dengan RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar Rp. …….. juta atau ……..% dan dibandingkan dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami penurunan sebesar Rp. …….. juta atau ……..%.

Realisasi total hasil penjualan ekspor dan lokal s/d Triwulan ....../20x4 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. …….. juta atau ……..% dan berada diatas RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. …….. juta atau ……..%, hal ini disebabkan harga jual rata-rata (ekspor dan lokal) kelapa sawit s/d Triwulan ....../20x4 berada diatas RKAP sebesar Rp. ……../kg atau 19,88%.

**2.2. Luas Areal (Ha)**

Luas Areal PT. Perkebunan Nusantara III s/d Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



**2.3. Produksi dan Produktivitas**

a. Produksi Kebun Sendiri

Produksi Karet dan Kelapa Sawit Kebun Sendiri s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 disajikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran ………

1). Karet

Realisasi produksi karet Triwulan ....../20x4 dibanding dengan RKAP tahun 20x4 mencapai ………% dan dibanding RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, bila dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar ……… ton atau ………%.

Pencapaian realisasi produksi karet sampai dengan Triwulan ....../20x4 mengalami penurunan dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 sebesar ……… ton atau ………% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ……… ton atau ………%, hal ini disebabkan :

* .........................................................................................................................
* .........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

2). Kelapa Sawit

Realisasi produksi TBS Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar …….. ton atau ……..%, dan bila dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar …….. ton atau ……..%.

Pencapaian produksi TBS s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar …….. ton atau ……..% dan dibanding RKAP s/d Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar …….. ton atau ……..%.

Hal ini disebabkan :

* .........................................................................................................................
* .........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

Realisasi produksi Minyak Sawit (MS) Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar …….. ton atau ……..%, dan bila dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar …….. ton atau ……..%.

Pencapaian realisasi produksi Minyak Sawit (MS) s/d Triwulan ....../20x4 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 sebesar …….. ton atau ……..% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar …….. ton atau ……..%, hal ini disebabkan :

* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* .........................................................................................................................

Realisasi produksi Inti Sawit (IS) Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ………% dan dibanding RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, dan bila dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar ……… ton atau ………%.

Pencapaian realisasi produksi Inti Sawit (IS) s/d Triwulan ....../20x4 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... dibanding realisasi s/d. Triwulan ....../20x3 sebesar ……… ton atau ………% dan berada diatas RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ……… ton atau ………%.

Realisasi produksi Minyak Sawit dan Inti Sawit (MS + IS) Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ………% dan dibanding RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, dan bila dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar ……… ton atau ………%.

Pencapaian produksi Minyak Sawit dan Inti Sawit (MS + IS) s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar ……… ton atau ………% dan dibanding RKAP s/d Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, hal ini disebabkan :

* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

b. Produksi Pihak Ketiga

Disamping produksi Kebun Sendiri, perusahaan juga membeli produksi dari Pihak Ketiga s/d. Triwulan ....../20x4, diuraikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran ……….

1). Karet Pihak III

Realisasi pembelian Pihak III produksi karet Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ………%, dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, bila dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami penurunan sebesar……… ton atau ………%.

Pencapaian realisasi pembelian produksi karet Pihak III s/d Triwulan ....../20x4 mengalami penurunan dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 sebesar ……… ton atau ………% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ……… ton atau ………%, hal ini disebabkan pembelian bokar dari pihak ketiga tidak tercapai karena rendahnya daya beli karet PTPN III bila dibandingkan dengan pihak swasta (harga jual karet yang menurun).

2). Kelapa Sawit Pihak III

Realisasi pembelian produksi TBS Pihak III Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ………% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada dibawah sebesar ……… ton atau ………%, bila dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami penurunan sebesar ……… ton atau ………%.

Pencapaian realisasi pembelian produksi TBS Pihak III s/d Triwulan ....../20x4 mengalami penurunan dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 sebesar ……… ton atau ………% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ……… ton atau ………%, hal ini disebabkan :

* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

**2.4. Beban Produksi**

Beban produksi karet dan kelapa sawit s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 diuraikan sebagai berikut :

1. Karet



Rincian dapat dilihat pada lampiran : 3/1-2

Total realisasi beban produksi kebun sendiri excl. penyusutan Triwulan ....../20X4 dibanding RKAP tahun 2014 mencapai 26,01% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20X4 berada diatas sebesar Rp.10.078 juta atau 6,47% bila dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20X3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar 13.878 juta atau 9,14%.

Total realisasi beban produksi kebun sendiri excl. penyusutan s/d. Triwulan ....../20X4 mengalami penurunan dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20X3 sebesar 1.703 juta atau 0,37% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20X4 sebesar 28.240 juta atau 5,87%.

Realisasi harga pokok Rp/kg excl. penyusutan Triwulan ....../20X4 dibanding RKAP tahun 2014 mencapai 99,79% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20X4 berada diatas sebesar Rp.1.748,04/kg atau 11,04%, bila dibanding dengan Triwulan ....../20X3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp.493,29/kg atau 2,89%.

Realisasi harga pokok Rp/kg excl. penyusutan s/d Triwulan ....../20X4 mengalami peningkatan dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20X3 sebesar Rp.177,69/kg atau 0,98% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20X4 sebesar Rp.918,46/kg atau 4,76%, hal ini disebabkan :

* .........................................................................................................................
* .........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
  + ........................................................................................................................

1. Kelapa Sawit

Beban produksi kelapa sawit s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 dapat diuraikan sebagai berikut :



Rincian dapat dilihat pada lampiran ……….

Total realisasi beban produksi kebun sendiri excl. penyusutan Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada diatas sebesar Rp. …….. juta atau ……..%, bila dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar …….. juta atau ……..%.

Total realisasi beban produksi kebun sendiri excl. penyusutan s/d. Triwulan ....../20x4 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 sebesar …….. juta atau ……..% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar …….. juta atau ……..%.

Realisasi harga pokok per kg excl. penyusutan Triwulan ....../20x4 dibanding dengan RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 berada diatas sebesar Rp. ……../Kg atau ……..%, bila dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp. ……../kg atau ……..%.

Realisasi harga pokok Rp/Kg excl. penyusutan kebun sendiri s/d Triwulan ....../20x4 berada dibawah s/d Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. ……../kg atau ……..% dan berada dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. ……../kg atau ……..%.

Hal ini disebabkan :

* .........................................................................................................................
* .........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

**2.5. Teknik**

a. Fasilitas Pengolahan

Fasilitas Pengolahan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari Pabrik Pengolahan Karet dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seperti yang diuraikan sebagai berikut :

1). Karet

Perkembangan Fasilitas Pengolahan Karet s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x3 diuraikan sebagai berikut :



Pabrik Karet milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebar di ……. lokasi Kebun dengan kapasitas terpasang total sebesar …….. ton Karet Kering/Hari sedangkan RKAP sebesar …….. ton karet Kering/Hari.

Realisasi total pengolahan karet Triwulan ....../20x4 dibanding RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 mencapai ……..%, sedangkan dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mencapai ……..%.

Realisasi total pengolahan karet s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi s/d Triwulan ....../20x3 mencapai ……..% dan dibanding RKAP s/d Triwulan ....../20x4 mencapai ……..%.

2). Kelapa Sawit

Perkembangan Fasilitas Pengolahan Kelapa Sawit pada Triwulan ....../20x4 dan Triwulan ....../20x3 diuraikan sebagai berikut :



Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebar di …… lokasi Kebun dengan kapasitas terpasang total …… ton TBS/jam, sedangkan RKAP ……. ton TBS/jam.

Realisasi total pengolahan kelapa sawit Triwulan ....../20x4 dibanding dengan RKAP tahun 20x4 mencapai ……..% (7 : 3) dan dibanding dengan RKAP Triwulan ....../20x4 mencapai ……..% (7 : 4) sedangkan dibanding dengan realisasi Triwulan ....../20x3 mencapai ……..% (7 : 5).

Realisasi total pengolahan kelapa sawit sampai dengan Triwulan ....../20X4 dibanding realisasi sampai dengan Triwulan ....../20x3 mencapai ……..% (9 : 6) dan dibanding dengan RKAP sampai dengan Triwulan ....../20x4 mencapai ……..% (9 : 8).

3). DRC Karet dan Rendemen Kelapa Sawit

a. Karet

DRC Lateks/Kompo Kebun yang diolah di Pabrik Karet PTPN III s/d. Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x4 dapat dilihat pada tabel berikut:



Penjelasan :

* Realisasi DRC Lateks Pekat s/d Triwulan ....../20x4 sama dengan realisasi Triwulan ....../20x3.
* Realisasi DRC Sheet s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 berada dibawah sebesar ……….%.
* Realisasi DRC Cr. Rubber High Grade s/d Triwulan ....../20x4 dibanding realisasi Triwulan ....../20x3 berada diatas sebesar ……….%.

b. Kelapa Sawit

Rendemen Pabrik kelapa sawit s/d. Triwulan ....../20x3, Triwulan ....../20x4 dan s/d. Triwulan ....../20x4 dapat dilihat pada tabel berikut :



1. Realisasi rendemen minyak sawit kebun sendiri s/d Triwulan ....../20x4, dibawah RKAP s/d Triwulan ....../20x4 kecuali rendemen minyak sawit di PRBTN.
2. Realisasi rendemen Inti sawit kebun sendiri s/d Triwulan ....../20x4 dibawah RKAP 20x4, kecuali ………………….

4). Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan/Limbah

a. Pabrik Kelapa Sawit

- Limbah Cair

* + - Limbah cair PKS (PRBTN, PSMKI, PSSIL, PANAS, PSSUT, PATOR, PSBAR, PTORA, PSMTI dan PPARO) dimanfaatkan ke areal tanaman kelapa sawit (Land Application) sesuai Kep Men LH Nomor : 28 tahun 2003.
    - Limbah cair PKS Sei Daun dipergunakan untuk proses pengolahan janjangan kosong menjadi kompos, dan Pengaplikasian limbah cair ke lahan sedang dalam proses pengkajian.

- Pengendalian Pencemaran Udara

Pengukuran/pengujian kualitas udara untuk pabrik kelapa sawit dilaksanakan dua kali dalam setahun sesuai Permen LH Nomor : 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Sumber tidak bergerak (Boiler), Kep Men LH Nomor : 13/MEN LH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak (Genset), PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Baku Mutu Udara Ambient) dan Kep Men LH Nomor : 50/MEN LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan oleh Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.

* + Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 dikumpulkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

* + Pengelolaan Limbah Padat

Limbah padat berupa Janjangan Kosong di aplikasikan keseluruhannya ke lahan, untuk Cangkang dan Fibre di gunakan sebagai bahan bakar Boiler, Abu sisa pembakaran Cangkang dan Fibre di Boiler digunakan untuk pengerasan jalan.

- Kondisi Lingkungan Umum

Secara umum areal sekitar pabrik ditata dengan baik dan ditanamai dengan bunga serta pohon pelindung.

b. Pabrik Pengolahan Karet

- Pengelolaan Limbah Cair

* Pabrik Sheet, Crumb Rubber dan Lateks Pekat

Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolahan karet sebelum dibuang kelingkungan terlebih dahulu dikelola pada IPAL sampai memenuhi baku mutu sesuai dengan Kepmen LH No. 51/MenLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

* + Pengendalian Pencemaran Udara

Pengukuran/pengujian kuwalitas udara untuk pabrik karet dilaksanakan dua kali dalam setahun sesuai Kep Men LH Nomor : 13/MEN LH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak (Genset), PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Baku Mutu Udara Ambient) dan Kep Men LH Nomor : 50/MEN LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan oleh Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.

* + Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 dikumpulkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

* + Pengelolaan Limba Padat

Limbah padat berupa besi bekas, seng bekas dikelola dengan baik.

* + Kondisi Lingkungan Umum

Secara umum areal sekitar pabrik ditata dengan baik dan ditanami dengan bunga serta pohon pelindung.

1. Rumah Sakit
   * Pengelolaan Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan Rumah Sakit (RSTOR, RSANS, RSMMA, RSDAP dan RSPAM) dikelola pada IPAL dengan peralatan Biodetox, untuk memenuhi baku mutu sesuai Kep Men LH Nomor : 58/Men LH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit.

* + Pengendalian Pencemaran Udara

Pengukuran/pengujian kualitas udara dilaksanakan dua kali dalam satu tahun sesuai Kep Men LH Nomor : 13/MEN LH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak (Genset), PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Baku Mutu Udara Ambient), Kep Men LH Nomor : 50/MEN LH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan dan Kep Bapedal 03/Bapedalda/09/1995 tentang Baku Mutu Emisi Udara untuk Incinerator oleh Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.

* + Pengelolaan Limbah B3

Limbah padat (limbah klinis) yang dihasilkan oleh Rumah Sakit dikendalikan dengan membakar pada Incinerator.

* Abu sisa pembakaran dimasukkan di dalam drum dan disimpan di TPS limbah B3 yang nantinya akan dikelola lebih lanjut oleh pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin dari Pemerintah.
* Seluruh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara III telah memiliki Incinerator (RSTOR, RSANS, RSPAM, RSMMA dan RSDAP).
  + Kondisi Lingkungan Umum

Areal sekitar Rumah Sakit (pekarangan dan halaman) ditata rapi dengan menanam bunga dan pohon pelindung..

* + Hasil Pengukuran Limbah :
* Pabrik Karet Lateks Pekat

Hasil pengukuran Limbah Cair adalah sebagai berikut :



* Pabrik Karet Crumb Rubber dan RSS

Hasil pengukuran limbah cair Pabrik Crumb Rubber RSS :



* Kualitas Limbah Cair Aplikasi Lahan

Hasil Pengukuran Limbah Cair untuk Aplikasi Lahan adalah sebagai berikut :



* Evaluasi Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit

Hasil pengukuran limbah cair Rumah Sakit yang dibuang ke lingkungan adalah sebagai berikut :



* Evaluasi Limbah B3 Periode s/d Triwulan ....../20x4

Jumlah persediaan Limbah B3 digudang tempat penyimpanan sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III adalah sebagai berikut :

1. Pelumas Bekas



1. Bateray Bekas



**2.6. Sekretariat Perusahaan**

a. Kesekretariatan

* Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatra Utara nomor : 005/731/BPSU/II/2014 tanggal 07 Juli 2014. Hal Undangan Pembahasan Water Waste Treatment di KEK Sei Mangkei tanggal 11 Juli 2014 di Ruang Rapat Prof. Dr. HS. Hadibroto, Ma Bappeda Provsu Jl. Pangeran Diponogoro No. 21 A Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Teknologi dan Kepala Bagian Perencanaan & Pengembangan.
* Menindaklanjuti surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 20/B.3/A.4/2014 tanggal 08 Juli 2014. Hal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Persiapan kegiatan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus tanggal 11 Juli 2014 di Ruang Rapat Pekanbaru, lantai III, Gedung Suhartoyo, BKPM Jl. Jendral Gatot Subroto No. 44 Jakarta, dihadiri oleh Bagian Perencanaan & Pengembangan.
* Menindaklanjuti surat dari PT. PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) nomor: SB/1/2352/2014 tanggal 08 Juli 2014. Hal Seleksi Calon Direksi PT. Bio Indrustri Nusantara tanggal 11 Juli 2014 di Kantor Perwakilan PTPN III (Persero) Jl. Proklamasi No. 25 Menteng Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan.
* Menindaklanjuti Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor: PW/05736/DPR RI/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014. Hal Undangan Pertemuan Konsultasi tanggal 11 Juli 2014 di Ruang Rapat Pimpinan DPR Rl Gedung Nusantara III, Lt. 3 Ruang 322 Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta, dihadiri oleh Direktur SDM & Kepala Bagian Hukum.
* Menindaklanjuti surat dari PT. Tiga Mutiara Nusantara nomor : 038/DIR-TMN/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014. Hal RUPS Tahun Buku 2013 PT. TMN tanggal 14 Juli 2014 di Aula Sawit PTPN III (Persero) Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, dihadiri oleh Direktur Keuangan & Kepala Bagian Keuangan.
* Menindaklanjuti surat dari Kementerian BUMN Nomor : UND-39/D1.MBU/1/2014 tanggal 14 Juli 2014. Hal Undangan Presentasi Tindak Lanjut PembentukanHolding BUMN Perkebunan Tanggal 16 Juli 2014 di Ruang RapatLantai 12 Kantor Kementrian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta, dihadiri oleh Direktur Keuangan.
* Menindaklanjuti surat dari Mentri Badan Usaha Milik Negara nomor : UND- 04/MBU/S/2014 tanggal 14 Juli 2014. Hal Sosialisasi Peraturan menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 di Hotel Sari Pan Pasific Jl. M.H. Thamrin 6 Jakarta, dihadiri oleh Direktur SDM.
* Menidaklanjuti surat dari Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III nomor : DK/3.00/U-15A/II/2014 tanggal 14 Juli 2014. Hal Undangan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tanggal 23 Juli 2014 di Ruang Rapat Kantor Direksi PTPN III (Persero) Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, dihadiri oleh Seluruh Direksi.
* Menidaklanjuti surat dari Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III nomor : DK/3.00/U-16A/I/2014 tanggal 14 Juli 2014. Hal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 23 Juli 2014 di Ruang Rapat Kantor Direksi PTPN III (Persero) Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan, dihadiri oleh Seluruh Direksi.
* Menindaklanjuti surat dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara nomor: UND- 114/D3.MBU/2014 tanggal 22 Juli 2014. Hal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Sinergi antara BUMN dan Perusahaan Daerah dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Tanggal 24 Juli 2014 di Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Kontruksi dan Jasa Lain, Lantai 7 Kementrian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta, dihadiri oleh Direktur Keuangan.
* Menindaklanjuti surat dari PT. Sarana Agro Nusantara Medan nomor : SAN.DIR/PTPN/183/V....../20X4 tanggal 4 Agustus 2014. Hal Undangan Rapat tanggal 7 Agustus 2014 di Kontor Direksi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dihadiri oleh Kepala Bagian Keuangan.
* Menindaklanjuti surat dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara nomor: 154/KPBN/P21-SDM/VII/2014 tanggal 23 Agustus 2014. Hal Undangan Halal Bi Halal 1435 H tanggal 11 Agustus 2014 di PT. KPB Nusantara Jl. Cut Mutiah No. 11 Jakarta Pusat, dihadiri oleh Direktur Utama.
* Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 005/7387/2014 tanggal 11 Agustus 2014. Hal Undangan Rapat HAN 2014 tanggal 13 Agustus 2014 di Ruang Kenanga Kantor Gubsu Lt. VIII Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Teknologi.
* Menindaklanjuti Surat dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : Und-03/D1.MBU.1/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Hal Undangan Rapat Pembahasan tindak lanjut rencana Holding BUMN Perkebunan tanggal 13 s.d 14 Agustus 2014 di Ruang Rapat Hotel Novotel Bogor Golf Estate Bogor Raya, Bogor, dihadiri oleh Kepala Bagian Sekretariat, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi.
* Menindaklanjuti Surat dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : Und-54/D4.MBU/08/2014 tanggal 16 Agustus 2014. Hal Undangan tanggal 22 Agustus 2014 di Yogyakarta Room, Hotel Santiaka Premiere Jl. Jendral Sudirman No. 19, Tugu Jogja, Yoqyakarta, dihadiri oleh Kepala Bagian TI/TB & MR (CMR).
* Menindaklanjuti surat dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara nomor: 005/557/C tanggal 15 Agustus 2014. Hal Penetapan Sumber Benih Karet Tanggal 25 Agustus 2014 di Ruang Rapat Kerja Kepala Dinas Perkebuanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar No. 9 Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Tanaman.
* Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor : 005/8772 tanggal 28 Agustus 2014. Hal Undangan tanggal 29 Agustus 2014 di Ruang Rapat Prof. DR. HS. Hadibroto, MA Bappeda Provsu Jl. Pangeran Diponegoro No. 21 A Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Perencanaan & Pengembangan.
* Menindaklanjuti surat dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : Und-59/D1.MBU/1/09/2014 tanggal 9 September 2014. Hal Undangan Rapat tanggal 10 September 2014 di Ruang Rapat Lantai 21, Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta, dihadiri oleh Kepala Bagian Akuntansi.
* Menindaklanjuti surat dari PT. Sarana Agro Nusantara Medan nomor : SAN.DIR/PTPN/230/IX/2014 tanggal 8 September 2014. Hal Undangan Rapat Pembahasan Teknis RKAP Tahun Buku 2015 PT. SAN tanggal 16 September 2014 di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV Jl. Letjend Suprapto No. 2 Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Keuangan.
* Menindaklanjuti surat dari Badan Musyawarah Direksi PT. Perkebunan Nusantara & PT. Rajawali Nusantara Indonesia nomor : 061/BMD- PTPN.RNI/IX/2014 tanggal 15 September 2014. Hal Rapat Periodik BMD - PTPN & PTRNI tanggal 19 September 2014 di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung, dihadiri oleh Direktur Utama.
* Menindaklanjuti Surat dari PT. Perkebunan Nusantara X nomor: XP0030014.12 tanggal 16 September 2014. Hal Undangan Rapat Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas Dan Direksi Dapenbun tanggal 19 September 2014 di Ruang Rapat Ruang Rapat Kantor Direksi PTPN VIII Jl. Sidang Sima No. 4 Bandung, dihadiri oleh Direktur Utama.
* Menindaklanjuti Surat dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor : Und-65/D1.MBU/1/09/2014 tanggal 22 September 2014. Hal Undangan tanggal 23 September 2014 di Ruang Rapat Lantai 12A Gedung Kementrian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12 Jakarta Pusat, dihadiri oleh Direktur Utama.
* Menindaklanjuti surat dari Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara nomor : 1960/BLH.SU/PPL&PL/2014 tanggal 22 September 2014. Hal Undangan Rapat Implementasi RECP Programme Ke Industri Kelapa Sawit Sumatera Utara di Aula BLH - SU Jl. Tengku Daud No. 5 Medan, dihadiri oleh Kepala Bagian Teknologi.
* Menindaklanjuti surat dari PT. Perkebunan Nusantara II nomor: 20/X/53/IX/2014 tanggal 18 September 2014. Hal Undangan Rapat tanggal 24 September 2014 di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, dihadiri oleh Kepala Urusan Sekretariatan dan Kepala Urusan HUMAS.

1. Data & Evaluasi Kerja

* Menindaklanjuti Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke DLAB I dan DLAB 2 pada tanggal 30 Juni s/d 4 Juli 2014..
* Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai surat nomor : 3.00/X/58/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal: Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
* Mempersiapkan Bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sesuai surat nomor : DK/3.00/U-14/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan Rapat Dewan Komisaris.
* Mempersiapkan Bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sesuai surat nomor : DK/3.00/U-15/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi.
* Mempersiapkan Bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sesuai surat nomor : DK/3.00/U-16/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Bagian.
* Menindaklanjuti surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai surat nomor : 3.00/BUMN/47/2014 tanggal 6 Agustus 2014 Perihal : Pemakaian Energi Listrik.
* Menindaklanjuti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai surat nomor : LG/06647/DPR RI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal : Permintaan untuk memberikan masukan terhadap RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
* Menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Dewan Komisaris & Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 16 April 2014.
* Menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Dewan Komisaris & Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 13 Mei 2014.
* Menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Dewan Komisaris & Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 16 Juni 2014.
* Menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Dewan Komisaris & Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 23 Juli 2014.
* Tindak Lanjut Raker dengan Komisi VI DPR Rl.
* Kunjungan Kerja Panja Aset BUMN Komisi VI DPR Rl di Provsu.
* Negoisasi harga dengan PT. Deloitte Konsultan Indonesia calon konsultan keuangan Holding BUMN Perkebunan.
* Pelaksanaan Hasil Keputusan BANI terhadap perkara PT. SON Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja BOC-BOD.

1. Humas

* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Silaturrahmi dalam rangka Idul Fitri 1435 H di Rumah Direktur SDM/Umum tanggal 08 Agustus 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan dalam rangka HUT Rl Ke-69 di Kantor Direksi tanggal 15 Agustus 2014.
* Meliput dan menghadiri Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdakaan Republik Indonesia Ke-69 Tahun tanggal 17 Agustus 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Kunjungan Kerja Tim Pokja RUU Standardisasi & Penilaian kesesuaian di PTPN III tanggal 18 Agustus 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Sosialisasi tentang Holding BUMN Perkebunan di PTPN III tanggal 19 Agustus 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Rapat Konsultasi Masalah BPJS Ketenaga Kerjaan di Wilayah Kab. Asahan PTPN III dengan Komisi D DPRD Asahan di Kantor Direksi Medan dan Tepung Tawar Haji tanggal 28 Agustus 2014.
* Mengurus kegiatan protokoler keberangkatan, kedatangan Direksi, Karyawan dan Tamu Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III ke Luar Daerah/Dalam Negeri.
* Guna meningkatkan pencitraan dan mengetahui perkembangan kinerja PT. Perkebunan Nusantara III, Humas bekerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam pemberitaan kegiatan - kegiatan di PT. Perkebunan Nusantara III untuk setiap bulan.
* Melaksanakan komunikasi dengan stakeholders (Pers, LSM dan lain - lain) yang membutuhkan informasi dan konfirmasi permasalahan yang ada di Perusahaan
* Meliput dan menghadiri pelaksanaan Serah Terima Jabatan Distrik Manajer & Manajer PTPN III di Medan tanggal 01 September 2014.
* Menghadiri acara kegiatan pelaksanaan dalam rangka Undangan Rapat tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kantor Gubsu tanggal 04 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Pelatihan Pam Swakarsa PTPN III di Sibolangit tanggal 11 dan 12 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Rapat Kerja Tim Holding PTPN III tanggal 15 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara pelaksanaan dalam rangka Penandatanganan Penyerahan hak tanah dari PTPN III kepada Unilever tanggal 17 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan Knowledge Sahring Holding Company dari PT. Pupuk Indonesia tanggal 18 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan pelaksanaan dalam rangka Kunjungan Kerja Tamu Perusahaan di Prapat & Brastagi tanggal 19 s/d 21 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan dalam rangka pembukaan dan pelaksanaan pelatihan Kemitraan Bina Lingkungan PTPN III di Sei Karang tanggal 22 September 2014.
* Meliput dan menghadiri acara kegiatan dalam rangka penutupan pelatihan Kemitraan Bina Lingkungan PTPN III di Sei Karang tanggal 24 September 2014.
* Mengurus kegiatan protokoler keberangkatan, kedatangan Direksi, Karyawan dan Tamu Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III ke Luar Daerah / Dalam Negeri.
* Guna meningkatkan pencitraan dan mengetahui perkembangan kinerja PT. Perkebunan Nusantara III, Humas bekerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam pemberitaan kegiatan - kegiatan di PT. Perkebunan Nusantara III untuk setiap bulan.
* Melaksanakan komunikasi dengan stakeholders (Pers, LSM dan lain - lain) yang membutuhkan informasi dan konfirmasi permasalahan yang ada di Perusahaan.

**2.7. Hukum Dan Manajemen Risiko**

2.7.1. Hukum

Sampai dengan Triwulan ....../20x4 telah direview berbagai Surat Perjanjian Kerja dari Bagian sebagai berikut :

* Bagian ………………. = ….. SPJ
* Bagian ………………. = ….. SPJ
* Bagian ………………. = ….. SPJ
* Bagian ……………… = ….. SPJ

Jumlah **= ….. SPJ**

Disamping itu telah menyurati :

* Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan Surat Nomor : 3.11/X/55/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Bantuan Hukum.
* Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara RI, dengan Surat Nomor : 3.11/X/56/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Bantuan Hukum.
* Law Office Bay Lubis & Partners, dengan Surat Nomor : 3.11/X/58/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Undangan.
* Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, dengan Surat Nomor : 3.11/X/59/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Pengurusan Perpanjangan Hak Merk PTPN III (Persero).
* Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan Surat Nomor : 3.11/X/66/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Permohonan Pertimbangan Hukum.
* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan Surat Nomor : 3.11/X/67/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang memberikan Keterangan.
* Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan Surat Nomor : 3.11/X/70/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Permohonan Penambahan Izin Pemanfaatan APU.
* Pimpinan DNC Advocate at Work, dengan Surat Nomor : 3.11/X/74/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pendampingan Pemegang Saham.
* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan Surat Nomor : 3.11/X/75/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Percepatan Permohonan Wilayah Usaha Pengelolaan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Umum.
* Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan Surat Nomor : 3.11/X/77/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pendapat/Kajian Hukum.
* DNC Konsultan, dengan Surat Nomor : 3.11/X/79/2014 tanggal 5 September 2014 tentang Penghunjukan Jasa Konsultan.
* Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan Surat Nomor : 3.11/X/80/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Mohon Pendamping Untuk Pertemuan Konsultasi.

2.7.2. Hukum dan Pertanahan

A. Proses Permohonan dan Perpanjangan HGU/HGB

1). HGU yang berakhir tahun 2005

Proses pengurusan perpanjangan penerbitan HGU yang berakhir tahun 2005 telah diajukan permohonan perpanjangan ke Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/X/26/2004 tanggal 26 Januari 2004 adalah sebagai berikut :



* Dari permohonan tersebut diatas telah terbit SK. Hak HGU dari BPN RI Pusat Jakarta sebagai berikut :



Keterangan :

* Untuk 2 (dua) Kebun yang telah terbit SK Haknya dan permasalahan proses penerbitan Sertifikat HGU di Kantor Pertanahan antara lain :

1. Kebun Sei dadap

* Adanya perbedaan luas dari pengajuan permohonan HGU PTPN III dengan SK Hak yang diterbitkan oleh BPN RI, karena adanya kekeliruan 2 (dua) kali pengurangan luas oleh BPN RI terhadap luas hasil pengukuran.
* Diharapkan agar BPN Pusat dapat menerbitkan perpanjangan SK-HGU dengan berpedoman kepada luasan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Menteri Negara BUMN, sesuai surat Nomor : S-744/MBU/2008 tanggal 17 September 2008 dan surat Nomor : S-53/MBU/2009 tanggal 27 Januari 2009, perihal Rekomendasi Luas Areal HGU untuk proses penerbitan SK-Hak di BPN.

1. Kebun Sei Putih

* Khusus Kebun Sei Putih yang pada saat ini telah diterbitkan perpanjangan SK - Haknya sesuai Surat Keputusan Kepala BPN No : 11/HGU/BPN-RI/2010 tanggal 17 Februari 2010, diharapkan pihak BPN dapatme-revisi kembali luasan areal dimaksud dengan pertimbangan bahwa objek areal yang berada dalam register perkara No. : 66/PDT/G/2006/PN-LP tanggal 9 Februari 2007 seluas 345,56Ha (ditangguhkan perpanjangannya), pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
* Salinan pernyataan putusan yang dikeluarkan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah disampaikan kepada BPN Pusat Jakarta (permohonan revisi luas telah disampaikan kepada BPN Pusat sesuai surat Direksi PTPN III No. : 3.09/X/147/2010 tanggal 19 2008 dan surat Nomor : S-53/MBU/2009 tanggal 27 Januari 2009, perihal Rekomendasi Luas Areal HGU untuk proses penerbitan SK-Hak di BPN.
* Selanjutnya untuk proses percepatan penerbitan perpanjangan SK. Hak terhadap kebun-kebun tersebut di atas, telah dimintakan bantuan dan koordinasi percepatan penerbitan SK. Hak di BPN Pusat Jakarta kepada Menteri BUMNsesuai surat Direksi PTPN-III (Persero) Nomor : 3.09/B UMN/19/2010 tanggal 17 Maret 2010.
* Saat ini PTPN III telah menghunjuk/menggunakan Jasa Notaris Nanda Fauz Iwan, SH yang berkedudukan di Jakarta melalui kerjasama kontraktual untuk pengurusan HGU PTPN III Kebun Sei Dadap, Kebun Sei Putih dan Kebun Sisumut di BPN RI Jakarta, karena untuk seluruh aktifitas baik teknis, administratib, koordinasi dan konsultasi dengan pihak - pihak terkait dapat berjalan cepat dan terlindungi serta dapat dipertanggung jawabkan secara profesional oleh Notaris tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi PTPN III dalam hal meminimalisir risiko untuk pengajuan HGU.
* Dari proses pengajuan perpanjangan HGU 4 (empat) Kebun yang belum mendapat pembaharuan SK Hak dari BPN RI- Pusat Jakarta yakni Kebun Bandar Betsy, Kebun Gunung Pamela, Kebun Sei Silau dan Kebun Sisumut disebabkan :
* Adanya perbedaan luas sebagaimana dimaksud, disebabkan perbedaan metoda/sys­tem pengukuran antara HGU yang lama dan baru oleh Kanwil BPN Sumut, dan terhadap perbedaan luas dimaksud, PTP Nusantara III dan

Pihak BPN Propinsi Sumatera Utara telah melakukan beberapa kali pertemuan dan pembahasan, dan hasil tersebut tertuang dalam Berita Acara Perbedaan Luas Hasil Pengukuran Bidang Tanah, tanggal 25 Agustus 2008.

* Diharapkan agar BPN Pusat dapat menerbitkan perpanjangan SK-HGU dengan berpedoman kepada luasan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Menteri Negara BUMN, sesuai surat Nomor : S-744/MBU/2008 tanggal 17 September 2008 dan surat Nomor : S-53/MBU/2009 tanggal 27 Januari 2009, perihal Rekomendasi Luas Areal HGU untuk proses penerbitan SK-Hak di BPN
* Terhadap permasalahan areal garapan yang ada/terdapat di masing-masing kebun sebagaimana tersebut di atas, saat ini PTPN III tetap berupaya untuk melakukan proses penyelesaian kepada masyarakat penggarap secara win-win solution dengan pola sugu hati sebagai kompensasi atas ganti rugi tanaman dan penyerahan secara sukarela dari masyarakat.
* Untuk Kebun Sisumut kendalanya disebabkan adanya gugatan keperdataan yang saat ini telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht).
* Dari proses pengajuan permohonan perpanjangan HGU tersebut diatas saat ini PTPN III telah mengajukan surat ke BPN RI untuk Percepatan Penerbitan SK Hak sesuai surat Nomor : 3.11/X/07/2014 tanggal 29 Januari 2014.

2). HGU yang berakhir tahun 2006

Proses pengurusan perpanjangan penerbitan HGU yang berakhir tahun 2006 telah diajukan permohonan perpanjangan ke Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai surat Direksi PTPN III Nomor 3.09/X/749/2005 tanggal 13 September 2005 adalah sebagai berikut :



Keterangan :

* Setelah diperoleh SK Hak Kebun Batang Toru/Desa Marancar, selanjutnya dilakukan pembayaran Uang Pemasukan ke Kas Negara sebagai salah satu syarat memenuhi kewajiban untuk penerbitan Sertifikat HGU, dan pendaftaran hak di BPN setempat serta diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dapat segera menerbitkan SHGU.
* Sesuai Surat Direksi PTPN III kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 3.09/X/468/2013 tanggal 11 Mei 2013 perihal Mohon Penerbitan Sertifikat HGU Kebun Batang Toru/Marancar.

3). HGU yang berakhir tahun 2010

Pengurusan perpanjangan Sertifikat HGU yang berakhir tahun 2010 sebanyak 2 (dua) Kebun yakni Kebun Aek Torop/Aek Raso dan Kebun Torgamba Group.

Permohonan perpanjangan HGU Kebun Torgamba Group (Sei Daun, Sei Kebara, Sei Baruhur dan Torgamba).

* Sebagai bahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa salah satu kendala dalam proses percepatan penerbitan perpanjangan Sertipikat HGU Kebun Torgamba Group adalah sehubungan diindikasikan sebahagian areal Kebun Torgamba Group yakni seluas 14.382 Ha masuk dalam kawasan hutan.
* Permasalahan Kawasan Hutan muncul sehubungan dengan pengajuan permohonan perpanjangan Sertipikat HGU milik PTPN III kepada BPN Propinsi Sumatera untuk objek HGU No : 2/Desa Aek Batu, yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan(dahulu Kabupaten Labuhan Batu) Propinsi Sumatera Utara, seluas ± 25.593,74 Ha (sesuai surat permohonan nomor : 3.09/X/593/2008, tanggal 23 Mei 2008), dimana atas proses permohonan perpanjangan dimaksud, pada tanggal 21 Agustus Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara(Panitia B) telah melaksanakan Pemeriksaan Tanah (Constaring Rep*ort)* diatas areal tersebut, dan dari hasil pelaksanaan pemeriksaan tanah sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Nomor : 01/BA/ PHTP/HGU/08/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunanan Nusantara III No. 2/Desa Aek Batu atas tanah seluas ± 25.602,22 Ha yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada klausul/huruf D mengenai Aspek Penguasaan Tanah dan Penggunaan Tanah di Lapangan, point 6 disebutkan bahwa atas tanah yang dimohon tersebut setelah *diplotting/overlay* kedalam peta lampiran SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005, ternyata diindikasikan ada areal seluas ± 14.094 Ha masuk dalam kawasan hutan produksi tetap dan seluas ± 288 Ha masuk ke dalam kawasan hutan suaka alam, sehingga seluruhnya seluas ± 14.382 Ha.
* Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, bahwa untuk proses perpanjangan terhadap Sertipikat HGU dimaksud, kepada pemohon/pemegang hak dipersyaratkanadanya rekomendasi/persetujuan lebih lanjut dari Menteri Kehutanan untuk perpanjangan SHGU No. : 2/Aek Batu, khususnya terhadap areal seluas ± 14.382 Ha .
* Menindak lanjuti hasil koordinasi dimaksud, PTPN III telah mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai surat Direksi Nomor : 3.09/DEPHUT/02/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009 Hal: Mohon Rekomendasi.
* Selanjutnya untuk proses percepatan penerbitan perpanjangan SK. Hak terhadap objek sebagaimana tersebut di atas, Direksi PTPN-III juga telah mengajukan Surat Kepada Kanwil BPN Prop. Sumatera Utara sesuai Suratnya Nomor : 3.09/X/121/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Penyelesaian status tanah kawasan hutan seluas + 14.382 Ha.
* Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor :PT.259/KUH-3/2011 tanggal 5 Agustus 2011 telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Badan Planologi Bogor untuk melakukan evaluasi dilapangan guna mendapatkan data dan informasi terkini, akurat dan konfrehensif sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian permohonan pelepasan kawasan hutan.
* Pada tanggal 22 Agustus 2011 PTPN-III telah melakukan Ekspose di Kantor Kementerian Kehutanan RI dalam rangka proses percepatan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan.
* Dalam pertemuan dimaksud Direktur Dirjend Planologi menyampaikan bahwa untuk proses pelepasan kawasan hutan dapat ditindak lanjuti apabila areal dimaksud telah ditetapkan sebagai areal Penggunaan Lain atau hutan yang dapat di Konversi di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
* Berdasarkan hasil koordinasi lebih lanjut yang telah dilakukan dengan BAPPEDA Sumut, areal seluas ± 14.382 Ha termasuk dalam salah satu pengajuan usulan revisi kawasan Hutan Sumatera dan akan diakomodir didalam penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
* Sehubungan telah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai revisi kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara, dari lampiran Peta Kawasan tersebut bahwa areal seluas ± 14.000 Ha (berada di wilayah Torgamba Group) telah diakomodir perubahan peruntukannya dari Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Permohonan perpanjangan HGU Kebun Aek Torop

* Sesuai Surat Perintah Setor dari Kanwil BPN Prop. Sumut Nomor : 620.887 tanggal 23 Juni 2009 telah dilakukan pembayaran pengukuran kepada Bendaharawan khusus Kanwil BPN Prop. Sumut melalui BRI Jalan Iskandar Muda dengan Rekening Nomor : AC.0336.01.000042.30.6, sebesar Rp.704.971.000,- (Tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terhadap permohonan Kebun Aek Torop dengan luas ± 10.253 Ha.
* Telah diajukan pemberkasan oleh Kanwil BPN Prop. Sumut kepada BPN Pusat sesuai surat Nomor : 2007-300.8/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 dan selanjutnya proses penerbitan SK Haknya di BPN Pusat.
* Namun terhadap proses perpanjangan SK. Hak HGU belum dapat diproses lebih lanjut sehubungan adanya catatan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat HGU dimaksud.
* Terhadap permasalahan Hak Tanggungan tersebut, telah diklarifikasi oleh Bank Mandiri bahwa SHGU No. 1/Aek Torop tidak dibebani Hak Tanggungan (sesuai surat Nomor : CBG.AGB/CBM.024/2012 tanggal 4 Januari 2012).
* Sehubungan dengan proses permohonan perpanjangan HGU PTPN III SHGU Nomor : I/Aek Desa Aek Batu, BPN RI telah menyurati Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai suratnya Nomor : 1026/14.3-300/....../20X3 tanggal 15 Maret 2013 antara lain.
  1. Data pembangunan kebun plasma disekitar kebun yang dimohon Hak Guna Usaha, atau
  2. Pernyataan dari pemohon untuk membangun kebun plasma dalam bentuk akta notaris, atau
  3. Data yang menunjukkan bahwa pemohon telah melaksanakan pola kemitraan dengan masyarakat petani plasma sesuai hasil penelitian yang dilakukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang disertai saran pendapat dalam bentuk Berita Acara.
  4. Melengkapi berkas permohonan dengan data pendukung yang telah dilegalisir oleh Notaris.
  5. Dari proses pengajuan permohonan perpanjangan HGU tersebut diatas saat ini PTPN III telah mengajukan surat ke BPN RI untuk Percepatan Penerbitan SK Hak sesuai surat Nomor : 3.11/X/07/2014 tanggal 29 Januari 2014.

C. Pelepasan Kawasan Hutan

* Permasalahan ini berhubungan dengan belum diterbitkannya izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI, hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara tidak dapat mencari areal pengganti sebagaimana yang telah disepakati bersama antara PTP IV dengan Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara (tanggal 26 Pebruari 1986 di Kantor Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara) dimana berdasarkan

Kesepakatan dimaksud sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522/29333 tanggal 14 Oktober 1986, menyatakan agar biaya untuk penyediaan areal pengganti diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara.

* Sebagai tindak lanjut surat Gubernur Sumatera Utara tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara telah menetapkan biaya pelepasan kawasan hutan seluas 11.000 Ha adalah sebesar Rp.151.500.000,- dan PTPN-IV telah melakukan penyetorannya ke Bank Ekspor Impor Cabang Medan dengan Nomor : AC.518621479 namun usaha pencarian lahan pengganti yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu baru mencapai ± 4.565 Ha.
* Selanjutnya atas hal tersebut diatas PT. Perkebunan Nusantara III telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dalam upaya mencari solusi penyelesaian lebih lanjut atas permasalahan dimaksud.
* Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan antara PTPN III dengan Pihak Departemen Kehutanan bahwa proses perubahan peruntukan Kawasan Hutan telah diajukan Bagian Planologi ke Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dan informasi terakhir yang kami peroleh bahwa pada saat ini Departemen Kehutanan telah mengajukan surat ke Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Fatwa Penyelesaian Areal Pengganti Kawasan Hutan dan Departemen Kehutanan menunggu Fatwa dari Mahkamah Agung atas penyelesaian areal pengganti kawasan hutan untuk pemberian kompensasi kawasan hutan yang telah dimanfaatkan/digunakan sebagai usaha perkebunan.
* Mengenai rencana usulan perubahan penetapan kawasan hutan dimaksud, Direksi PT. Perkebunan Nusantara III telah menyurati Menteri Kehutanan RI sesuai surat Nomor : 3.09/DEPHUT/02/2009 tanggal 19 Nopember 2009, perihal Mohon Rekomendasi dan Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor : 3.09/X/683/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Mohon Keterangan.
* Atas permasalahan ini bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan BAPPEDA Sumatera Utara, areal seluas ± 14.382 Ha termasuk dalam salah satu pengajuan usulan revisi Kawasan hutan Sumatera Utara menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (sesuai surat Gubernur Sumatera Utara yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009).
* Menindaklanjuti perkembangan dimaksud, Direksi PT. Perkebunan Nusantara III kembali telah mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan RI sesuai surat Direksi Nomor : 3.09/DEPHUT/07/2011 tanggal 31 Januari 2011, dan surat Nomor : 3.09/X/300/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Klarifikasi Permasalahan Kawasan Hutan, serta surat kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Nomor : 3.09/X/299/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permasalahan Kawasan Hutan.
* Sebagai bahan informasi, bahwa pada saat ini asset negara yang berada diatas areal dimaksud terdapat 8 (delapan) unit usaha yang terdiri dari 4 Kebun, 3 Pabrik Kelapa Sawit dan 1 Unit Rumah Sakit serta telah diusahai PT. Perkebunan Nusantara III selama ± 26 Tahun, yang dilengkapi sarana infrastruktur berupa perkantoran, perumahan Karyawan, yang didukung dengan jumlah tenaga kerja beserta batih yang ada pada saat ini sebanyak ± 12.382 orang.
* Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor : PT.259/KUH-3/2011 tanggal 5 Agustus 2011 telah dilakukan peninjauan

lapangan oleh Tim Badan Planologi Bogor untuk melakukan evaluasi dilapangan guna mendapatkan data dan informasi terkini, akurat dan konfrehensif sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian permohonan pelepasan kawasan hutan.

* Pada tanggal 22 Agustus 2011 di PTPN III telah melakukan Ekspose di Kantor Kementerian Kehutanan RI dalam rangka proses percepatan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan.
  + Dalam pertemuan dimaksud Direktur Dirjend Planologi menyampaikan bahwa untuk proses pelepasan kawasan hutan dapat ditindak lanjuti apabila areal dimaksud telah ditetapkan sebagai areal Penggunaan Lain atau hutan yang dapat

di Konversi di dalam Rencana Umum tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

* Berdasarkan hasil koordinasi lebih lanjut yang telah dilakukan dengan BAPEDDA Sumut, areal seluas ± 14.382 Ha termasuk dalam salah satu pengajuan usulan revisi kawasan Hutan Sumatera Utara dan akan diakomodir didalam penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
* Berkenaan hal tersebut diatas dari koordinasi yang terus dilaksanakan dengan Kanwil BPN Propsu, bahwa untuk melanjutkan proses perpanjangan/ Pembaharuan HGU yang salah satu kelengkapan data harus dipenuhi oleh PTPN III selaku pemohon/pemegang hak adalah adanya surat keterangan persetujuan perubahan HPT menjadi HPL, saat ini PTPN III telah menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan RI, sesuai surat Direksi Nomor : 3.1 l/X/46/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Mohon Penerbitan Surat Keterangan.
* Berkaitan hal tersebut telah mendapat tanggapan dari Menteri Kehutanan RI sesuai suratnya Nomor : S-772/VII-REN/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Surat Keterangan yang intinya masih dalam proses dan ditelaah di internal Kementerian Kehutanan.
* Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai revisi kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara, dari lampiran Peta Kawasan tersebut terhadap areal lainnya (± 5.892 Ha) yang notabenenya telah diusulkan perubahnnya oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara belum terakomodir didalam lampiran Peta SK Menhut dimaksud, (terindikasi berada di Kebun Sei Meranti Labuhanbatu Selatan dan Kebun Bukit Tujuh diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
* Berkenaan hal tersebut PTP. Nusantara III dalam hal ini mengajukan surat ke Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara sesuai surat Direksi Nomor : 3.1 l/X/82/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Tindaklanjut penyelesaian permasalahan kawasan hutan yang belum terakomodir dalam keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.579/Men-Hut-II/2014.

D. Permohonan Pengurusan Sertifikat HGB Kebun Rambutan (eks Kiben Damanik)

* + - Telah diajukan permohonan Sertifikat HGB Kebun Rambutan seluas 3,5 Ha (eks Kiben Damanik) ke Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi sesuai surat Nomor : 3.09/X/668/2010 tanggal 11 Juni 2010.
    - Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran serta peninjauan lapangan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi sesuai Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 2023/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
    - Telah dilakukan koordinasi ke BPN Kota Tebing Tinggi untuk percepatan penerbitan SK Haknya dan sertifikat HGB-nya.

E). Permohonan Pengurusan Sertifikat HGU untuk areal pengembangan yang terletak di Desa Muara Opu dan Desa Rianiate (Ampolu) Kabupaten Tapanuli Selatan.

* Sesuai surat Direksi Nomor : 3.09/X/1048/2010 tanggal 29 Oktober 2010 telah diajukan permohonan Sertifikat HGU ke Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas ± 820,88 Ha dan sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut telah dilaksanakan pengukuran oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 584/SPS-200.6/IV/2010 tanggal 23 April 2010 luas 720 Ha dan Surat Perintah Setor (SPS) Tambahan No: 1011/SPS-200.6/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, luas 100,88 Ha.

Selanjutnya sesuai Surat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 210-300.8/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 telah dilaksanakan Pemeriksan Tanah oleh Panitia B dan saat ini sedang menunggu proses penerbitan Risalah Panitia B.

Sesuai surat Direksi Nomor : 3.09/X/1049/2010 tanggal 29 Oktober 2010 telah diajukan permohonan Sertifikat HGU ke Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Desa Rianiate (Ampolu), Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas ± 549,22 Ha dan sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut telah dilaksanakan pengukuran oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 585/SPS-200.6/IV/2010 tanggal 23 April 2010.

* Selanjutnya sesuai Surat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 211-300.8/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 telah dilaksanakan Pemeriksan Tanah oleh Panitia B dan saat ini sedang menunggu proses penerbitan Risalah Panitia B.
* Telah diajukan pemberkasan oleh Kanwil BPN Prop. Sumut kepada BPN Pusat sesuai surat Nomor : 1534-300.8/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan luas 820,88 Ha dan nomor : 1535-300.8/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan luas 548,33 Ha selanjutnya proses penerbitan SK. Haknya di BPN Pusat.
* Sehubungan surat Kanwil BPN Prop. Sumatera Utara Nomor : 1723/10-12.300/2012 tanggal 5 Nopember 2012, telah dilakukan penandatangan oleh Direksi PTPN III mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah areal pengembangan Muara Opu dengan luas 775,98 Ha dan luas 548,33 ha

b. Penanganan Permasalahan Areal**.**

1). Kebun Bandar Betsy

* + - * + Terhadap permasalahan areal garapan Kebun Bandar Betsy adalah sebagai berikut :

- Luas areal garapan kelompok tani Koreker = 191,40 Ha

- Luas areal garapan kelompok tani KTBR = 129,00 Ha

- Jumlah areal garapan Suharji Cs = 85,25 Ha

- Jumlah seluruh luas garapan Kebun Bandar Betsy **= 405,65 Ha**

- Penyelesaian secara sukarela Kelompok Tani Koreker = 40,00 Ha

- Penyelesaian sugu hati Suharji Cs = 73,25 Ha

- Penyelesaian Kelompok Tani KTBR = 103,88 Ha

- Sisa luas garapan HGU Kebun Bandar Betsy **= 188,52 Ha**

* + - * + Penyelesaian Lahan Garapan Melalui Pemberian Uang Sugu Hati
    - Pada saat ini telah dilaksanakan pemberian uang sugu hati atas ganti rugi tanaman terhadap para penggarap Kelompok Tani KTBR Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV seluas 103,88 Ha.
    - Diharapkan dengan adanya langkah awal pemberian uang sugu hati kepada masyarakat tani/penggarap, akan membawa dampak/pengaruh yang positif terhadap kelompok masyarakat tani/penggarap lainnya.
* Sehubungan dengan surat Sekjend. Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) Nomor : B-170/Sesjen/V/2011, tertanggal 21 Mei 2011 (terdapat kesalahan penulisan tahun terhadap surat tersebut) perihal Kajian Daerah Setjen Wantannas ke Wilayah Prop. Sumut, telah dilakukan kunjungan Tim Setjen WANTANNAS didampingi oleh Bagian Umum dan Bagian Hukum melakukan kunjungan ke PEMKAB Simalungun yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi serta peninjauan lapangan terhadap areal yang dituntut/klaim oleh Kelompok Tani KOREKER yang berlokasi di Afd. VIII Kebun Bandar Betsy.
* Sebagaimana Surat Undangan Sekjen Wantannas Nomor : Und-144/Sesjen/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 telah dilakukan pertemuan antara Wantannas dengan PTPN III, dalam pertemuan tersebut membahas tentang sikap PTPN III terhadap penyelesaian sengketa lahan Kebun Bandar Betsy khususnya dan PTPN III pada umumnya.

PT. Perkebunan Nusantara III menyampaikan bahwa akan melakukan penyelesaian dengan 2 pola yaitu :

* Pola Suguh Hati
* Melalui Jalur Hukum
  + - * + Penyelesaian Lahan Garapan Melalui Jalur Hukum
    - Proses penyelesaian kasus areal garapan kelompok Kemin CS (KTBR) seluas 129 Ha di Afdeling VI Kebun Bandar Betsy telah memasuki pemanggilan para saksi PTPN III Kebun Bandar Betsy untuk dimintai keterangan dihadapan sidang majelis hakim dan terdakwa (Kemin CS).
* Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/PID.B/2010/PN.Sim tanggal 25 Januari 2010 mengadili terdakwa I. Kemin, Terdakwa III Rukiman dan terdakwa IV. Tukirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan.
* Terhadap putusan tersebut terdakwa-terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

2). Kebun Sei Silau

Terhadap permasalahan areal garapan yang berada di Kebun Sei Silau adalah sebagai berikut :

* Luas areal HGU Kebun Sei Silau yang digarap oleh masyarakat = 748,88 Ha
* Luas areal HGU Kebun Sei Silau yang digarap oleh Sukimin CS = 50,00 Ha
* Jumlah areal garapan oleh Masyarakat/Sukimin CS = 798,88 Ha
* Yang telah diambil alih melalui pemberian sugu hati = 126,65 Ha
* Luas areal HGU Kebun Sei Silau yang masih digarap oleh mesyarakat = 672,23 Ha

Penyelesaian yang telah dilakukan PTPN III adalah :

* Penyelesaian Areal Garapan Melalui Jalur Hukum
* Perkara Pidana a/n Sukimin dkk (13 orang tedakwa) menguasai areal Perkebunan/menggarap areal HGU Kebun Sei Silau tanpa izin seluas ± 41,63 Ha.
* Proses hukum terhadap perkara tersebut s/d saat ini telah adanya Putusan Mahkamah Agung RI atas masing-masing terdakwa :

1. Nomor : 1477K/Pid.Sus/2010 tanggal 04 Oktober 2010 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa s/d Tukijo Alias Kijo dkk (Iskandar, Sutarmin, Tugimin, Paimin).
2. Nomor : 1608K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Januari 2010 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa a/n. Khaidir dkk. (Budianto alias Budi, Juwanto, Sugito alias Gito, Suryadi alias Adi).
3. Nomor : 1475K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Juni 2010 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa a/n. Radi.
4. Nomor : 1458K/Pid.Sus/2010 tanggal 05 Juli 2010 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa a/n. Sukimin.

* Penyelesaian Areal Garapan Melalui Pemberian Uang Sugu Hati
  + Saat ini luas yang telah dilaksanakan pemberian sugu hati kepada masyarakat penggarap seluas ± 82,30 Ha sedangkan garapan masyarakat seluas ± 43,11 Ha telah dikembalikan kepada Kebun Sei Silau tanpa ganti rugi (sukarela).
  + Jumlah keseluruhan areal yang telah dikuasai/diusahai PT. Perkebunan Nusantara III seluas 126,65 Ha, dan saat ini telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit/karet.

3). Kebun Gunung Pamela

Penyelesaian permasalahan areal garapan yang berada di Kebun Gunung Pamela adalah sebagai berikut :



Areal garapan Kebun Gunung Pamela yang terletak di Afd, I s/d. IV adalah seluas 328,38 Ha sedangkan areal garapan yang terletak di Afd. V s/d. VII adalah seluas 336,07 Ha.

Upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Kebun Gunung Pamela :

* Melalui Musyawarah/Persuasive
* Telah dilakukan pendekatan kepada masyarakat penggarap dengan cara persuasive dan mengundang penggarap serta Muspika namun belum ada kesepakatan.
* Kepada penggarap yang telah mengembalikan areal garapannya diupayakan akan diberikan pemberian sugu hati/ganti rugi tanaman.
* Melalui Jalur Hukum
* Telah dilakukan pengaduan ke Polres sesuai No : STPL/692/X/2011/SPK/TT tanggal 12 Oktober 2011.
* Polres Tebing Tinggi telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap penggarap perorangan dan penggarap yang bernaung dalam Organisasi Tani Maju Bersama yang diketuai Sdr. Darwin Saragih, SH.
* Proses penyelesaian melalui jalur hukum masih terus berlanjut ke tahap pemanggilan saksi ahli dan peninjauan lapangan.

4). Kebun Silau Dunia

Sehubungan dengan Surat Pemkab. Serdang Bedagai No. : 18.1/005/1995/2012 tanggal 31 Mei 2012 hal Undangan Rapat, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Umum (Kantor Bupati Serdang Bedagai) membahas kasus sengketa tanah antara Masyarakat Desa Damak Urat dengan PTPN-III Kebun Silau Dunia seluas ± 500 Ha dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

* Pemberian Suguh Hati tidak mempunyai dasar dan tidak mungkin dilanjutkan, namun masyarakat bersikukuh atas hasil dari pada Manajemen Kebun agar diteruskan.
* PTPN-III mengarahkan untuk menempuh jalur hukum.
* Masyarakat dan Tim Mediasi mengharapkan jangan menempuh jalur hukum.
* Agar Tim Mediasi dapat membicarakan ke Bupati Serdang Bedagai dan meneruskan ke Direksi PTPN-III tentang penyelesaian (Suguh Hati atau CSR dilingkungan masyarakat sekitar).

5). Kebun Merbau Selatan

* Terhadap permasalahan areal garapan Kebun Merbau Selatan seluas ± 99,88 Ha oleh Kelompok Tani Suka Damai pada tahun 2001, saat ini telah diperoleh solusi penyelesaiannya dengan pemberian uang sugu hati kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dimaksud.
* PT. Perkebunan Nusantara III bekerjasama dengan Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyelesaikan permasalahan areal garapan seluas 99,88 Ha kepada Kelompok Tani Suka damai dengan pemberian tali asih yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2010.
* Bahwa areal seluas 99,88 saat ini telah diajukan permohonan untuk penerbitan SK Hak di Kantor BPN Propinsi Sumatera Utara sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/X/33/2014 tanggal 28 April 2014.
* Sehubungan dengan pengajuan permohonan Hak Guna Usaha dimaksud, Kanwil BPN Prop Sumatera Utara mohon agar PTPN III terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pengukuran ke Kanwil BPN terhadap areal tersebut sesuai suratnya Nomor : 639/10-12.300/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
* Menindaklanjuti surat tersebut PTPN III telah mengajukan Permohonan Pengukuran ke Kanwil BPN Prop. SU sesuai surat Direksi Nomor : 3.11/X/48/2014 tanggal 19 Juni 2014.
* Untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah seluas 99,88 dimaksud dapat dilaksanakan setelah adanya penyetoran biaya kepada Bendaharawan Khusus Kanwil BPN Prop SU. sesuai dengan surat nya Nomor : 19/SPS-12.200.6/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.
* Pada tanggal 13 Agustus 2014 telah ditransfer ke rekening Bendaharawan Khusus Kanwil BPN propinsi Sumatera Utara, selanjutnya tinggal menunggu pelaksanaan pengukuran oleh juru ukur BPN Prop. Sumatera Utara terhadap areal dimaksud.
* Saat ini telah dilaksanakan pengukuran oleh Kanwil BPN Prop. Sumatera Utara areal seluas 99,88 Ha Kebun Merbau Selatan, selanjutnya proses penerbitan Haknya di Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara

6). Kebun Rambutan

Permasalahan areal garapan di areal Kebun Rambutan (Kampung Samben) seluas ± 14,48 Ha :

* Tentang hak atas tanah yang menjadi objek sengketa yang diperkarakan Masyarakat dengan PTPN III sudah jelas berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang sudah Incrah.
* Kondisi realisasi dilapangan seluruh areal yang menjadi kasus sengketa yang diatasnya ada berdiri bangunan rumah-rumah penduduk, fasilitas social, fasilitas umum berada diatas HGU Nomor 1 Tahun 1996.
* Permohonan masyarakat untuk mengganti rugi seluruh areal dipersengketakan yang telah mendapatkan Putusan Incrah sebesar Rp.2.450/M, pihak PTPN III menyatakan agar tetap taat hukum (PTPN III menolak)

7) Kebun Batang Toru/Pijor Koling

* Permasalahan Areal Eks PTPN III Pijor Koling seluas ± 79 Ha.
* Untuk proses penyelesaian permasalahan lahan eks PTPN III Pijor Koling seluas ± 79 Ha, PT. Perkebunan Nusantara III bersama dengan Pihak Pemerintah Kota Padang Sidempuan secara intensif melakukan pertemuan-pertemuan maupun koordinasi dalam rangka mencari solusi penyelesaian atas permasalahan dimaksud.
* Sesuai surat dari Pemko Padang Sidempuan Nomor : 973/2832/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal Blok Plan dan NJOP, Pihak Pemko Padang Sidempuan telah menyampaikan proposal penyelesaian eks tanah PTPN III Pijor Koling dalam bentuk BLOK PLAN.
* Namun setelah mempelajari proposal dimaksud, peruntukan areal seluas ± 79 Ha tersebut masih jauh dari harapan bagi PTPN III untuk ikut serta dalam penyertaan modal guna pengembangan Kawasan Bisnis di areal Pijor Koling Kota Padang Sidempuan.
* Berkenaan hal tersebut diatas, PTPN III mengambil kebijakan untuk solusi penyelesaian permasalahan lahan eks PTPN III Pijor Koling seluas ± 79 Ha dapat dilaksanakan melalui proses ganti rugi oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan sesuai ketentuan yang berlaku (Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum).
* Atas hal dimaksud, Direksi PT. Perkebunan Nusantara III telah mengajukan surat kepada Walikota Padang Sidempuan sesuai surat Nomor : 3.11/X/27/2010 tanggal 17 Maret 2010, perihal Permasalahan Pijor Koling.
* Menanggapi solusi penyelesaian yang disampaikan kepada Pemko Padang Sidempuan, pada prinsipnya pihak Pemerintah Kota Padang Sidempuan dapat menerima solusi penyelesaian permasalahan lahan eks PTPN III Pijor Koling seluas ± 79 Ha melalui musyawarah dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku (vide surat Walikota Padang Sidempuan No : 593.42/1816/2010, Perihal lahan Eks PTPN III Pijor Koling).
* Terhadap permasalahan Pijor Koling seluas ± 79 Ha dengan pihak Pemko Padang Sidempuan akan ditinjau dan dikoordinasikan kembali bersama-sama dengan Pihak Pemko Padang Sidempuan ke Menteri BUMN untuk proses pelepasannya.
* Telah diajukan permohonan pelepasan areal Pijor Koling ke Menteri BUMN sesuai surat Direksi PTPN III No. 3.09/BUMN/46/2010 tanggal 17 Mei 2010.
* Selanjutnya atas hal tersebut, telah mendapat tanggapan dari Kementerian BUMN Deputi Bidang Restrukrisasi Perencanaan Strategi BUMN plt. Asisten Deputi Riset dan Informasi sesuai suratnya No : S-254/D.MBU/2013 tanggal 09 September 2013 Perihal : Konfirmasi Kebijaksanaan tentang Penyelesaian Permasalahan Lahan Pijor Koling Milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).
* Menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 30 Desember 2013 sesuai surat Direksi PTP. Nusantara III Nomor : 3.11/BUMN/102/2013 telah diajukan surat ke Kementerian BUMN.
* Permasalahan Areal PT. Perkebunan Nusantara III dengan PT. Gunung Tinggi Lestari seluas ± 23,20 Ha
* Terhadap permasalahan areal PTPN III yang akan ditukar gulingkan seluas ± 23,20 ha dengan PT. Gunung Tinggi Lestari dengan areal seluas ± 300 ha.
* Upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebagai berikut :
* Telah dibuat surat ke PT. Gunung Tinggi Lestari Nomor : III.0/X/457/1998 tanggal 11 Nopember 1998 agar menghentikan seluruh kegiatan diatas areal HGU PTPN-III seluas ± 23,20 Ha.
* Telah dibuat surat ke Gubernur Sumut Nomor : III.0/X/517//1999 yang isinya meminta agar areal seluas ± 300 Ha tersebut dapat dibuka sambil menunggu penetapan perbatasan yang defenitif antara kedua Kabupaten.
* Telah diminta kepada TIM Pemkab Tapteng untuk penjelasan lahan seluas ± 300 Ha tersebut masuk wilayah Tapsel atau Tapteng.
* Telah ditempuh jalur perdata dengan PT. Gunung Tinggi Lestari sebagai Tergugat dan PTPN III sebagai Penggugat.
* PTPN III telah memenangkan perkara di PN. Padang Sidempuan dengan Putusan No. : 28/Pdt.G/2006/PN.Psp namun pihak PT. GTL banding ke PTN Medan.
* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 06/Pdt.Eks/2010/PN.Psp, jo No. 28/Pdt./G/2006.PN.Psp guna melakukan sita eksekusi terhadap Harta Barang Milik Tergugat.
* Telah dilaksanakan pemasangan Plank diareal HGU seluas ± 23,20 Ha dimaksud.
* Pada penyelesaian areal Ruislagh ± 23,20 Ha Kebun Batang Toru melaksanakan pertemuan dengan beberapa tahapan-tahapan :
  + - Pertemuan pertama antara PTPN III dengan masyarakat Pemilik Non Pengusaha Kecil telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2010 yang diwakili oleh Forum Komunikasi Masyarakat Bersatu Aek Pining dan Sumuran (FMBAP) dengan hasil masyarakat mengusulkan agar eksekusi lahan tidak dilaksanakan secara fisik, dan masyarakat bersedia membayar

ganti rugi tanah Negara melalui PTPN III selaku Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan.

* Pertemuan kedua antara PTPN III dan pemilik SPBU telah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan hasil pemilik SPBU memohon untuk penyelesaian permasalahan dilaksanakan melalui proses ganti rugi dimaksud, pihak SPBU mengharapkan agar dasar ganti rugi tidak menggunakan harga pasar setempat.
* Rencana pertemuan ketiga dengan masyarakat pemilik Perumnas sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari masyarakat.
* Telah dibentuk Tim sesuai SKPTS Direksi PTPN III Nomor : 3.11/SKPTS/08/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Persiapan Pelaksanaan Eksekusi Areal Tukar Guling (Ruislagh) Kebun Batang Toru seluas ± 23,20 Ha.
* Bersama dengan Bagian Hukum & Manajemen (3.11) mendampingi petugas juru ukur DTAPS dalam rangka mengukur luasan areal PT. Gunung Tinggi Lestari yang akan dieksekusi serta menginventarisasi areal yang berada di dalam luasan ± 23,20 Ha.
* Sehubungan dengan surat Direksi PTPN III (Persero) Nomor : 3.11/KOM/44/2012 tanggal 24 Juli 2012 hal izin pelepasan asset dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PTPN III sesuai suratnya Nomor : DK/3.11/45/V....../20X2 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Persetujuan Pelepasan Asset Kebun Batang Toru PTPN III (Persero) seluas 23,20 Ha.
* Sehubungan dengan Surat Direksi PTPN III kepada Meneg BUMN Nomor : 3.11/BUMN/47/2012 tanggal 17 September 2012 hal Izin Pelepasan Asset telah mendapat tanggapan dari Kementerian Negara BUMN sesuai suratnya nomor : S-518/D5.MBU/2012 tanggal 11 Desember 2012 hal : Kelengkapan Dokumen Usulan Penghapusbukuan dan Pemindatanganan Aktiva Tetap PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Batang Toru.
* Bahwa untuk kelengkapan data yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan suratnya dimaksud, PTPN III telah mengajukan dan memenuhinya data-data tersebut sesuai dengan surat Direksi Nomor : 3.11/BUMN/06/2014 tanggal 23 Juli 2014.

3). Penggunaan Areal Untuk Pihak Ke Tiga

* + - * Kebun Sei Putih (Proyek Revitalisasi Sei Ular)

Luas areal PTPN III yang akan dibebaskan adalah sebagai berikut :

* Untuk tahun anggaran 2007 dan harus segera dilaksanakan adalah :
  + Kebun Sei Putih, seluas ± 5,56 Ha, diperuntukkan sebagai saluran pengelak yang nantinya terhadap areal ini akan dibuat secara pinjam pakai dan akan dikembalikan setelah selesainya proyek ini (diperkirakan untuk jangka waktu 3 tahun).
  + Areal seluas ± 4,9 Ha yang direncanakan untuk pembangunan tanggul/ bangunan pelengkap yang harus dibebaskan.
    - Untuk tahun anggaran 2009 setelah bendungan berfungsi, akan ada areal PTPN III yang tergenang, yang lokasinya disebelah Hulu Bendungan seluas ± 45,60 Ha.
    - Untuk proses percepatan pelaksanaan, telah dilaksanakan koordinasi antara PTPN III dengan Gubernur Sumatera Utara yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penggunaan Lahan PTPN III untuk Proyek Revitalisasi Daerah Irigasi Sei Ular antara PTPN III dengan Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 3.09/BA/07/2007 tanggal 9 Nopember 2007.
* Selanjutnya telah diperoleh persetujuan dari Meneg BUMN sesuai surat Nomor : S-229/MBU/2008 tanggal 3 April 2008 hal Permohonan Pelepasan Areal HGU PTPN III untuk proyek Revitalisasi Daerah Irigasi Sungai Ular, dengan persetujuan jangka waktu pelepasan aktiva diberikan untuk 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan.
* Namun sampai dengan bulan Mei 2009, Panitia Pelaksanaan Proyek belum dapat merealisasikan pekerjaan dilapangan.

Sehubungan hal dimaksud, telah diajukan permohonan perpanjangan persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap oleh Direksi PTPN III kepada Menteri Negara BUMN, sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/BUMN/97/2009 tanggal 19 Nopember 2009.

* Sesuai Surat Direksi Nomor : 3.09/BUMN/77/2010 tanggal 15 September 2010 telah diajukan permohonan persetujuan pelepasan areal HGU PTPN III Kebun Sei Putih seluas ± 23,10 Ha untuk kepentingan Proyek Revitalisasi Sungai Ular ke Menteri BUMN.
* Sesuai Surat Direksi Nomor : 3.09/BUMN/85/2010 telah diajukan percepatan penerbitan persetujuan ke Menteri BUMN atas permohonan pelepasan areal seluas ± 23,10 Ha dan atas permohonan areal seluas ± 4,9 Ha untuk kepentingan Proyek Revitalisasi Sungai Ular serta persetujuan perpanjangan penghapus bukuan aktiva tetap.
  + - * Kebun Sei Meranti

Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Rokan Hilir yang menghubungkan dari Jalan Lancang Kuning sampai ke Jalan H. Annas Maamun Kebun Sei Meranti.

* Sesuai surat permohonan dari :
* Camat Bagan Sinembah Nomor : 410/PMD/2009/15 tanggal 14 Januari 2009.
* Bupati Rokan Hilir Nomor : 100/TP/2009/146 tanggal 18 Pebruari 2009.

Perihal pembangunan jalan lingkar Lancang Kuning menuju Jalan H. Annas Maamun Kecamatan Bagan Sinembah sepanjang ± 17 Km dan lebar ± 25 M.

* Telah terbit surat permohonan rekomendasi pelepasan areal HGU PTPN III Kebun Sei Meranti seluas ± 1,42 Ha oleh Dewan Komisaris sesuai suratnya Nomor : DK/3.09/R-09/V/2009 tanggal 15 Mei 2009.
* Selanjutnya telah dimohonkan pelepasannya ke Meneg BUMN sesuai surat Direksi Nomor : 3.09/BUMN/42/2009 tanggal 5 Juni 2009.
* Sehubungan sampai dengan saat ini belum diperolehnya persetujuan/izin pelepasan aset arel HGU PTPN III Kebun Sei Meranti dari Kementerian BUMN, maka saat ini PTPN III akan mengajukan kembali permohonan tersebut dengan terlebih dahulu melengkapi data pendukung berupa Kajian Legal dan Ekonomi terhadap dampak penghapusbukuan aktiva tetap asset PTPN III.
* Berkenaan hal tersebut telah diajukan kembali persetujuan/izin pelepasan asset areal HGU PTPN III Kebun Sei Meranti seluas ± 1,42 Ha untuk rencana pembangunan jalan lingkar Kabupaten Rokan Hilir ke Meneg BUMN sesuai Surat Direksi Nomor : 3.11/BUMN/20/2013 tanggal 19 Maret 2013.
* Selanjutnya telah mendapat persetujuan dari Meneg BUMN selaku Pemegang Saham sesuai suratnya Nomor : S-309/MBU/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindatanganan Aktiva Tetap Milik PTPN III (Persero) untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Rokan Hilir.
* Berkaitan hal tersebut untuk kajian secara menyeluruh terhadap ganti rugi asset tanah, tanaman dan bangunan yang ada diatasnya, PTPN III telah melakukan penawaran kepada Lembaga Apraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan sesuai surat Direksi Nomor : 3.11/X/23/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 perihal Penawaran Penilaian Aset.
* Sebagai hasil/laporan pelaksanaan Appraisal terhadap nilai ganti rugi tanah HGU PTPN III Kebun Sei Meranti seluas ± 1,42 Ha atas tanah dan tanaman yang ada diatasnya yang terkena rencana Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Rokan Hilir, dimana nilai pasar dari property dimaksud sebesar Rp.497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
* Kebun Membang Muda
* Permohonan areal HGU oleh Bupati Labuhan Batu Utara untuk rencana pembangunan pusat Perkantoran Pemkab. Labuhan Batu Utara.
* Sesuai surat permohonan dari Bupati Labuhan Batu Utara, masing- masing :
* Nomor : 593/3558/Pemb-I/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal Mohon Dukungan Rencana Pembangunan Pusat Perkantoran Pemkab. Labuhan Batu Utara.
* Nomor : 011/217/Pem/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal Permohonan Pelepasan Asset PTPN III Membang Muda Aek Kanopan.
* Dari rekomendasi Dewan Komisaris Nomor : DK/3.09/R-23/V....../2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan persetujuan pelepasan areal dari Meneg BUMN sesuai surat Nomor : S-25/MBU/2010 tanggal 22 Januari 2010 telah dibuat Kesepakatan Bersama dalam rangka Rencana Pembangunan Kantor Bupati Labuhan Batu Utara antara PTPN III dengan Pemkab. Labuhan Batu Utara tanggal 05 Oktober 2010.
* Sesuai surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor : 3.09/X/777/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan penetapan nilai ganti rugi lahan dan tanaman kepada Bupati Labuhan Batu Utara sehubungan rencana pembangunan Pusat Perkantoran Pemkab. Labuhan Batu Utara.
* Berkenaan hal tersebut, sesuai dengan Point e surat Meneg BUMN Nomor : S-25/MBU/2010 tanggal 22 Januari 2010 dan belum adanya ganti rugi atas asset PTP. Nusantara III Kebun Membang Muda oleh Pemkab Labura saat ini kembali diajukan rekomendasi izin pembaharuan asset ke Dewan Komisaris PTPN III.
* Selanjutnya Dewan Komisaris telah menyetujui Rekomendasi Ijin Pembaharuan Pelepasan Lahan seluas ± 5 Ha untuk pusat perkantoran Pemkab. Labura sesuai surat Nomor : DK/3.11/04/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.
* Permohonan Areal HGU oleh Bupati Labuhanbatu Utara untuk Rencana Pelebaran Jalan Negara Kabupaten Labuhanbatu Utara.
* Berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 602/315/DPU-LBU/2011 tanggal 23 September 2011 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Negara dari Aek Kanopan – Gunting Saga dan Surat Sekda Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor : 593.3/2734/Tapem/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Mohon Persetujuan/Izin Pelaksanaan Pekerjaan, yang intinya bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan pelebaran jalan ± 3.800 meter, lebar badan jalan ± 20 meter dan total luas ± 76.000 meter (± 7,60 Ha), yang mana pelebaran jalan tersebut melintasi areal HGU PTPN III Kebun Membang Muda.
* Sesuai surat Direksi PTPN III dimohonkan rekomendasi dari Komisaris PTPN III sesuai surat Nomor : 3.09//KOM/157/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal PTPN III Pelebaran Jalan Negara Kabupaten Labuhanbatu Utara.
* Telah diperoleh persetujuan pelepasan lahan seluas 7,60 Ha di areal PTPN III Kebun Membang Muda dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor : DK/3.09/R-61/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011.
* Telah dilaksanakan penilaian asset/taksiran harga ganti rugi terhadap aktiva berupa tanah berikut tanaman yang ada diatasnya oleh PT. Surveyor Indonesia cq. KJPP Sukrial, Setiawan & Rekan.
* Sesuai Surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/X/293/2012 tanggal 30 Maret 2012 telah diajukan penetapan nilai ganti rugi lahan dan tanaman kepada Bupati Labuhan Batu Utara sehubungan rencana Pelebaran Jalan Negara Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan besaran nilai pasar untuk ganti rugi tanah dan tanaman terhadap objek seluas ± 7,60 Ha ditetapkan sebesar Rp.8.740.000.000,- (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
* Permohonan Areal eks HGU oleh Bupati Labuhanbatu Utara untuk Rencana Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
* Sesuai surat Permohonan dari Bupati Labuhanbatu Utara, Nomor : 593/1719/TAPEM/2012 tanggal 04 September 2012 perihal Mohon Izin Pelepasan Sebahagian Areal Eks HGU PTPN III Kebun Membang Muda seluas ± 5 Ha untuk Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
* Telah diajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal HGU PTPN III Kebun Membang Muda seluas ± 5 Ha kepada Dewan Komisaris sesuai Surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/KOM/74/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
* Telah diperoleh Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Lahan seluas ± 5 Ha di areal PTPN III Kebun Membang Muda dari Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor : DK/3.11/72/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
* Sehubungan dengan Surat Direksi PTPN III kepada Meneg BUMN Nomor : 3.11/BUMN/53/2012 tanggal 27 September 2012 hal Mohon Izin Prinsip Memulai Pekerjaan, dimana atas permohonan tersebut telah mendapat tanggapan dari Menteri Negara BUMN sesuai suratnya Nomor : S-450/MBU/D5/2012 tanggal 14 Nopember 2012 hal : Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
* Saat ini telah diajukan permohonan persetujuan pelepasan asset ke Menteri BUMN sesuai surat Direksi PTPN-III Nomor : 3.11/BUMN/74/2012 eks HGU PTPN III Kebun Membang Muda seluas ± 5 Ha untuk Pembangunan Kantor DPRD Kab. Labuhanbatu Utara.
* Berkaitan hal tersebut, telah mendapat persetujuan Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap milik PTPN III untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai suratnya Nomor : S-96/MBU/2013 tanggal 13 Februari 2013.
* Pada tanggal 09 Januari 2013 sesuai Surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/X/01/2013 telah disampaikan ke Bupati Labura mengenai besaran Nilai Ganti Rugi Penghapusbukuan terhadap asset Kebun Membang Muda untuk perkantoran DPRD Labura sebesar Rp.5.455.200.000 (Lima milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari penilai aset (Appraisal) KJPP Abdulalah Fitriantoro & Rekan sesuai laporannya Nomor : 696/LAP/O.1/KJPP/VI/13 tanggal 20 Juni 2013*.*
* Bahwa hingga berakhirnya izin persetujuan pelepasan yang diberikan oleh Menteri BUMN, pihak Pemkab Labura belum juga dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap aset tersebut, PTPN III kembali mengajukan pembaharuan pelepasan aset yang dimaksud ke Menteri BUMN berjangka waktu minimal 3 tahun sesuai surat Direksi Nomor : 3.11/BUMN/04/2014 tanggal 30 Juni 2014.
* Sehubungan dengan sural Direksi FTPN III Nomor: 3.H/BUMN/04/2014 tanggal 30 Januari 2014 telah ditanggapi oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN sesuai suratnya Nomor : S-131/D1.MBU/1/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal kelengkapan Data untuk memperbaharui rekomendasi Komisaris dan Pakta Integritas Direksi.
* Berkenaan hal tersebut telah diajukan kembali pembaharuan rekomendasi izin pelepasan aset ke Dewan Komisaris sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/KOM/64/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
* Sehubungan dengan surat pengajuan pembaharuan rekomendasi ke Dewan Komisaris telah memperoleh Rekomendasi Ijin pelepasan asset dari Dewan Komisaris sesuai suratnya Nomor : DK/11/47/IX/2014 tanggal 30 September 2014
* Kebun Sisumut
* Sesuai surat permohonan dari Bupati Labuhan Batu Selatan, masing-masing :
  + Nomor : 590/007/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 perihal Pinjam Pakai Lahan PTPN III untuk areal Perkantoran Pemerintahan Kab. Labuhan Batu Selatan seluas 20 ha.
  + Nomor : 590/58/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Pinjam Pakai Lahan PTPN III untuk areal Perkantoran Pemerintahan Kab. Labuhan Batu Selatan.
* Sesuai surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/4973 tanggal 30 Juni 2009 perihal Pinjam Pakai Lahan PTPN III untuk areal Perkantoran Pemerintahan Kab. Labuhan Batu Selatan seluas 20 Ha.
* Sesuai Surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/KOM/104/2009 tanggal 26 Oktober 2009 hal Permohanan Rekomendasi Pelepasan Lahan seluas ± 5 Ha di areal PTPN III (Persero) Kebun Sisumut dan selanjutnya telah diperoleh Rekomendasi dari Komisaris PTPN III Nomor : DK/3.09/R-38/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
* Saat ini telah diajukan permohonan persetujuan pelepasan asset ke Menteri BUMN sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/BUMN/24/2010 tanggal 20 Maret 2010 perihal Permohonan persetujuan pelepasan lahan seluas ± 5 Ha di areal HGU PTPN III Kebun Sisumut untuk rencana pembangunan pusat perkantoran Pemkab. Labuhan Batu Selatan.
* Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kementerian BUMN Assisten Deputi Riset dan Informasi Nomor : S-137/S.MBU/2010 tanggal 9 Desember 2010 perihal Kelengkapan Dokumen Permohonan Pelepasan Lahan di Areal HGU PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sisumut, dengan ini telah disampaikan Surat Direksi kepada Sekretaris Kementerian BUMN Assisten Deputi Riset dan Informasi melalui suratnya Nomor : 3.09/BUMN/26A/2011.
* Telah dilaksanakan penilaian asset/taksiran harga ganti rugi terhadap aktiva berupa tanah berikut tanaman yang ada diatasnya untuk rencana pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan oleh PT. Surveyor Indonesia cq. KJPP Sukrial, Setiawan & Rekan.
* Sesuai Surat Direksi PTPN III Nomor : 3.09/X/60/2012 tanggal 20 Januari 2012 telah diajukan penetapan nilai ganti rugi lahan dan tanaman kepada Bupati Labuhan Batu Selatan sehubungan Rencana Pembangunan Kantor Bupati Lab. Batu Selatan dengan besaran nilai pasar untuk ganti rugi tanah dan tanaman terhadap objek seluas 5 Ha ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah.
* Kebun Dusun Hulu

Sesuai surat Permohonan Bupati Batu Bara, masing-masing :

* Nomor : 620/0591 tanggal 31 Januari 2012 perihal permohonan penggunaan lahan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai jalan akses ke RSUD sepanjang ± 3,6 km dari batas parit bekoan batas PT. Perkebunan Kuala Gunung dengan PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Dusun Hulu.
* Nomor : 620/5208 tanggal 5 September 2012 perihal Mohon Percepatan Penerbitan Izin Prinsip Pembangunan Jalan Baru menuju RSUD Kabupaten Batu Bara yang melintasi areal HGU PTPN-III Kebun Dusun Hulu.

Atas permohonan tersebut, bahwa saat ini PTPN-III :

* Sesuai surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III kepada Dewan Komisaris sesuai suratnya Nomor : 3.11/KOM/57/2012 tanggal 18 September 2012 hal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III.
* Selanjutnya Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi Pelepasan Areal HGU di Kabupaten Batu Bara sesuai surat No : DK/3.11/60/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
* Kemudian PTPN III melakukan Kajian Legal dan Kajian Ekonomis terhadap pelepasan asset tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-06/MBU/2010 tanggal 27 Oktober 2010 jo Nomor : Per-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.
* Setelah dilakukan Kajian Legal dan Kajian Ekonomis PTPN III saat ini telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pelepasan Lahan seluas ± 2,84 Ha di areal HGU BUMN Kebun Dusun Hulu untuk Rencana Pembangunan Jalan Baru menuju RSUD Kab. Batu Bara kepada Menteri Negara BUMN sesuai surat Nomor : 3.11/BUMN/67/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
* Berkenaan hal tersebut diatas Meneg BUMN sesuai surat No. S-731/MBU/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah menyetujui pelepasan aset areal HGU PTP. Nusantara III (Persero) Kebun Dusun Hulu untuk Pembangunan Jalan Menuju RSUD Kabupaten Batu Bara.
* Sebagaimana hasil/laporan pelaksanaan Appraisal terhadap nilai ganti rugi tanah HGU PTPN III Kebun Dusun Hulu seluas ± 2.84 Ha beserta tanaman dan bangunan diatasnya, nilai pasar dari property dimaksud sebesar Rp.1.690.700.000,- (sati milyar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
* Selanjutnya PTPN III telah mengajukan surat ke Pemkab Batu Bara Nomor : 3.11/X/09/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang intinya Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak untuk akses jalan menuju RSUD Batu Bara.
* Pada tanggal 24 Maret 2014 Pemkab Batu Bara sesuai surat Setdakab Nomor : 593.83/1362 perihal Pembayaran Ganti Rugi terhadap asset PTPN III Kebun Dusun Hulu yang terkena akses jalan tersebut, mengingat proses jangka waktu surat Persetujuan yang diberikan oleh Menteri BUMN telah berakhir, maka sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/X/32/2014 tanggal 23 April 2014 diharapkan pihak Pemkab Batu Bara agar mengajukan kembali Permohonan tersebut ke PTPN III untuk menghindari terjadinya penyimpangan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
* Berkenaan hal tersebut Pemkab Batu Bara telah menindaklanjuti surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III sesuai surat Setdakab Nomor : 592.2/1956 tanggal 08 Mei 2014 perihal Permohonan Jangka Waktu Pembayaran Ganti Rugi Aset PTPN III.
* Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor : 3.11/BUMN/34/2014 tanggal 4 Juni 2014 prihal Permohonan Pembaharuan Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindatanganan Aset PTPN III (Persero) Kebun Dusun Hulu seluas 2,84 Ha telah diajukan kembali Persetujuannya ke Menteri Negara BUMN.
* Atas pengajuan surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/BUMN/34/2014 tanggal 4 Juni 2014 telah ditanggapi oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN sesuai suratnya Nomor : S-311/D1.MBU/1/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal kelengkapan Data, yaitu untuk memperbaharui rekomendasi Komisaris dan Pakta Integritas Direksi.
* Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN Nomor : S-311/D1.MBU/1/2014 tanggal 23 Juni 2014 dimaksud PTPN III telah memenuhi kelengkapan data tersebut sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/BUMN/49/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
* Kebun Batang Toru

Permohonan pinjam pakai sebahagian lahan HGU milik PTPN III yang berlokasi di Afd. I seluas ± 2,1254 Ha dan di Afd. IV selus ± 0,2408 Ha Kebun Batang Toru untuk pertapakan Tower Jaringan SUTET 275 KV, 150 KV dan Gardu Induk oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau :

* Sesuai surat dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Riau Nomor : 1518/131/PIKITRING SUAR/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Permohonan izin pinjam pakai lahan Perkebunan Batang Toru PTP. Nusantara III untuk pembangunan tower transmisi 150 KV.
* Telah diperoleh Rekomendasi dari Dewan Komisaris PTP. Nusantara III No : DK/3.09/R-34/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Rekomendasi Pembangunan Tapak Tower Transmisi Listrik 150 KV dan 275 KV PT. PLN di areal HGU PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Batang Toru seluas ± 2,3662 Ha.
* Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-623/MBU/2011 tanggal 09 Nopember 2011 hal Persetujuan pinjam pakai sebagian areal lahan HGU milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk pembangunan tapak tower SUTET 275 KV dan 150 KV serta Gardu Induk.
* Telah dilakukan kajian/penilaian tentang besarnya nilai sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Syukrial Setiawan & Rekan.
  + - Sesuai Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor : 3.09/X/321/2012 tanggal 09 April 2012 telah diajukan penetapan nilai ganti rugi lahan dan tanaman kepada General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau PT. PLN (Persero) untuk pertapakan Tower Jaringan SUTET 275 KV, 150 KV dan Gardu Induk terhadap objek di Afd. I seluas ± 1,9092 Ha ditetapkan sebesar Rp.1.622.863.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terhadap objek di Afd. IV Pijor Koling seluas ± 0,2410 Ha ditetapkan sebesar Rp.24.100.000,- (Dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).
  + Kebun Silau Dunia dan Kebun Sei Putih

Sesuai surat permohonan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera Utara I, untuk Ijin Inventarisasi/Pendataan Lokasi Jalur T/L 150 kV GI. Galang – GI. Nagori Dolok yang melintasi areal HGU PTPN III Kebun Silau Dunia dan Kebun Sei Putih sesuai surat Nomor : 361/131/RING SUM I/2012 tanggal 2 April 2012. Selanjutnya atas permohonan tersebut diatas telah dilakukan survey bersama dengan pihak PT. PLN (Persero) dalam rangka menginventarisasi tanah dan tanaman di areal HGU PTPN III Kebun Silau Dunia dan Kebun Sei Putih.

* Untuk proses selanjutnya mengajukan Rekomendasi ke Dewan Komisaris PTPN III mengenai permohonan PT. PLN untuk penggunaan sebahagian areal HGU milik PTPN III sesuai surat Direksi Nomor : 3.11/KOM/62/2013 tanggal 25 Juli 2013.
* Atas hal tersebut telah mendapat Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Lahan dari Dewan Komisaris untuk pendirian tapak tower 150 kV PT. PLN sesuai surat nya Nomor : DK/3.11/49/V....../20X3 tanggal 16 Agustus 2013.
* Berkenaan hal dimaksud, pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham dan hal ini telah disampaikan kepada pihak PT. PLN sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/X/127/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
* Saat ini telah diajukan permohonan persetujuan penggunaan lahan untuk pendirian tapak Tower 150 kV ke Menteri BUMN sesuai surat Direksi PTPN III Nomor : 3.11/BUMN/102/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  + Kebun Sei Putih, Kebun Tanah Raja dan Kawasan KEK Sei Mangkei

Untuk Akses Jalur Pipa Pertamina Gas (PERTAGAS)

* Sehubungan dengan surat Pertamina Gas (Pertagas) Nomor : 670/PG0000/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Penggunaan Lahan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk Right of Way (ROW) Pipa Gas guna mendukung program pemerintah tentang konversi Bahan Bakar Minyak ke Gas bagi industri dan untuk menjamin pasokan gas KIM Medan serta Kawasan KEK Sei Mangkei.

Rencana penempatan pembangunan pipa gas tersebut akan melewati areal HGU milik PTP Nusantara III (Persero) yakni:

* Kebun Tanah Raja
* Kebun Rambutan
* Kawasan Ekonomi Sei Mangkei
* Berkenaan hal tersebut guna untuk mendukung program pemerintah terhadap konversi bahan bakar minyak ke gas, Menejemen PTPN III dengan pihak Pertamina Gas telah melakukan peninjauan lapangan dan inventarisasi terhadap tanah dan tanaman yang terkena jalur Pipa Gas.
* Dari pelaksanaan peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan terhadap aset PTPN III yang terkena jalur pipa tersebut di Kebun :

Kebun Tanah Raja

* + - Luas areal

Areal Afdeling I, Afd III dan V sepanjang 6.041 Meter dengan rincian panjang 6.041 M X Lebar 14 M = 84.574 Meter atau 8.46 Ha

* + - Tanaman

Kelapa Sawit 344 pokok

* + - 1. Kebun Rambutan
    - Luas areal

Areal Afdeling VI Sei Semujur sepanjang 1.723 Meter dengan rincian Panjang 1.723 M X 14 M = 24.122 M atau 2.41 Ha

* + - Tanaman
* Kelapa Sawit 508 Pokok
* Karet 919 pokok
  + - 1. Kawasan Ekonomi Sei Manpkei
    - Luas areal

Areal Afdeling I dan II Kebun Dusun Hulu sepanjang 3.332 Meter dengan rincian 3.332 M x 14 M = 46.648 M atau 4,7 Ha.

* + - Tanaman

Kelapa Sawit 538 pokok

Tanaman Konversi :

* + - Jati Putih 10 pokok
    - Mahoni 21 pokok
    - Jabon 11 pokok
* Selanjutnya terhadap pemakaian lahan di areal HGU PTPN III untuk masing- masing Kebun tersebut yang terkena rencana jalur pipa gas milik Pertamina Gas telah diajukan Izin Sewa Pakai ke Dewan Komisaris PTPN III sesuai surat Direksi Nomor : 3.11/Kom/66/2014 tanggal 17 September 2014.
* Berkenaan hal tersebut telah memperoleh Rekomendasi Ijin dari Dewan Komisaris untuk sewa pakai areal tersebut sesuai surat Dewan Komisaris Nomor : DK/3.11/48/2014 tanggal 30 September 2014.
  + Kebun Tanah Raja untuk Pembangunan Fasilitas Perkantoran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
* Sehubungan dengan surat Bupati Serdang Bedagai Nomor : 18.1/593/ 3642/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal permohon pelepasan lahan untuk kepentingan pembangunan fasiltas perkantoran fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya Kabupaten Serdang Bedagai di areal HGU PTPN III Kebun Tanah Raja seluas + 10 Ha.
* Menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 11 September 2014 menejemen PTPN III dan pihak Pemkab Serdang Bedagai telah melakukan peninjauan bersama diareal tersebut yang berada di Afdeling V Kebun Tanah Raja.
  + **Kebun Rambutan untuk Pembangunan Bendung Sei Sibarau dan Normalisasi Irigasi Sei Padang.**
* Sehubungan dengan surat Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara Nomor : TN 13.03/IE-I/615 tanggal 21 Juli 2014 perihal ijin penggunaan lahan PTPN III yang terkena rencana pembangunan Bendung dan Saluran Sei Padang di Kabupaten Serdang Bedagai di sebahagian areal HGU PTPN III Kebun Rambutan.
  + - * Berkenaan hal tersebut, pada tanggal 12 Agustus telah dilakukan peninjauan bersama dan inventarisasi tanah dan tanaman antara pihak manajemen PTPN III dan Dinas PU SNVT Sumatera II Prop. Sumatera Utara serta PT. Waskita Karya.
      * Bahwa dari pelaksanaan peninjauan areal dimaksud, terletak di Afdeling I, III, IV dan Afdeling V seluas ± 20,1 Ha.
  + Rencana Peralihan hak

Sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masing-masing :

* Nomor : 119/HGU/BPN/2005 tgl. 23-12-2005, KMMDA, seluas 328,87 Ha.
* Nomor :115/HGU/BPN/2005 tgl. 23-12-2005, KRPPT, seluas 485,50 Ha.
* Nomor :116/HGU/BPN/2005 tgl. 23-12-2005, KANAU/KANAS, seluas 123,19 Ha;

yang akan dipergunakan untuk Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah setempat, maka berdasarkan Surat Direksi PTPN III telah diajukan Peralihan Hak kepada Komisaris PTPN III sesuai No : 3.09/DK/28/2008 tanggal 21 Mei 2008.

* Sesuai Rekomendasi dari Komisaris PTPN III Nomor : KOM/3.09/R-21/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, telah dimintakan persetujuan Peralihan Haknya ke Meneg BUMN Nomor : 3.09/BUMN/57/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
* Telah terbit Persetujuan Peralihan Haknya dari Meneg BUMN sesuai Surat No : S-07/MBU/2009 tanggal 12 Januari 2009.
* Telah diajukan permohonan Peralihan Haknya dari HGU menjadi hak pakai ke Kanwil BPN Prop. Sumut sesuai permohonan hak pakai untuk masing-masing.
* Kebun Membang Muda No. 3.09/X/453/2009 tanggal 29 April 2009.
* Kebun Rantau Prapat No. 3.09/X/454/2009 tanggal 29 April 2009.
* Kebun Aek Nabara Utara No. 3.09/X/455/2009 tanggal 29 April 2009

**2.8. TI & PTB / CMR**

Kegiatan yang dilakukan Bagian TI & PTB/CMR s/d. Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :

A. Sistem Informasi

1). Program Aplikasi

a. Pembangunan :

* Aplikasi Premi Panen Kelapa Sawit dan Premi Deres
* Aplikasi Kartu Riwayat Tanaman (KRT)
* Aplikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
* Aplikasi Informasi Sistem Manajemen PTPN3
  + - 1. Test Run :
* Aplikasi data Statistik Produksi Karet dan Kelapa Sawit

1. Parallel Run :

* Aplikasi Aktiva Tetap
* Aplikasi Gaji Karyawan strata I s/d III
* Aplikasi Computerized Maintenance Management System (CMMS)

2). Kegiatan :

a. Apdating Program Aplikasi

b. Updating Website PT Perkebunan Nusantara .... dan Situs PT Perkebunan Nusantara .... di BUMN Online.

c. Evaluasi DEO PB-71 sistem aplikasi SIMAP tanggal 5 dan 6 Agustus 2014 di Kandir Medan.

d. Pelatihan SIMAP (PB-71) tanggal 11 s/d 14 Agustus 2014 di Pusdiklat Sei Karang.

e. Pelatihan Presentation Training tanggal 28 dan 29 Agustus 2014 si Pusdiklat Sei Karang.

f. Sosialisasi DEO PKS, PKO, dan PPK tanggal 04 September 2014 di DSIMA.

g. Workshop IT "Big Data dan Teknologi Cloud" tanggal 24 September 2014 di Jakarta.

h. Seminar "The 1st" Indonesia Digital and Social Learning Seminar Exhibition tanggal 24 dan 25 September 2014 di Jakarta.

B. Sistem Manajemen

1). Audit Stage-2 sertifikasi ISPO di DLAB1, KBUTU, KSMTI, KTORA, PSMTI, PTORA oleh Mutu Agung dari tanggal 10 s.d. 19 Juli 2014.

2). Workshop dan Baseline Mapping Pembinaan Petani Swadaya Berkelanjutan Mitra PMSKI.

3). Tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2014, Audit Stage-2 ISPO PATOR, KATOR, PPARO, KPARO oleh PT TUV Rheinland Indonesia.

4). Pemantauan RSPO dan ISPO di DTAPS, KBGTU, KHPSG, dan PHPSG dari tanggal 08 s.d. 13 September 2014.

* + - * 1. Penandatanganan Kerja sama antara PT Perkebunan Nusantara .... dengan Solidaridad pada tanggal 25 September 2014.

6). Tanggal 13 s.d. 16 Agustus 2014, Baseline Mapping Lanjutan Program Pembinaan Petani Swadaya berkelanjutan Mitra PSMKI.

7). Tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2014, Audit Stage-2 ISPO PATOR, KATOR, PPARO, KPARO oleh PT TUV Rheinland Indonesia.

8). Penarikan Dokumen Kadaluarsa SM PN3 dan SMK3 dari tanggal 06 Juli s.d. 05 Agustus 2014.

9). Revisi Enterprise Process PTPN - III berkaitan dengan Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK) untuk proses on line sistem.

10). Mengkompilasi Laporan Pemantauan MR SM PN-3 pada Triwulan I tahun 2014 untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian.

11). Mengikhtisarkan Laporan Pemantauan MR SM PN-3 Triwulan I tahun 2014 untuk dilaporkan kepada Direksi PTPN III.

12). Proses Bisnis Lingkage pada Prosedur Kerja (PK) dan Istruksi Kerja (IK) untuk proses on line system (sesuai Memorandum No. 3.12/Bag/MO/642/2014 tanggal 28 Agustus 2014).

13). Investigasi Kecelakaan Kerja di beberapa Kebun/ Unit pada tanggal 11 s.d. 23 Agustus 2014.

Kompilasi Kecelakaan Kerja dan biaya yang timbul di seluruh Kebun/ Unit.

15). Kompilasi Laporan tindak lanjut Temuan Ketidaksesuaian Audit Eksternal SMK3 untuk 13 Kebun/ Unit.

16). Proses Bisnis Linkage pada Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK) untuk proses on line sistem.

17). Membuat manual system Manajemen PT Perkebunan Nusantara .... untuk proses on line sistem.

18). Tindak lanjut Revisi Prosedur Kerja/ Instruksi Kerja dari Bagian Kantor Direksi.

C. Piranti Keras

1). Jaringan LAN dan Fiber Optic

* + Perbaikan Jaringan LAN di DATIM tanggal 03 s.d. 06 Juli 2014 sesuai Memorandum No : DATIM/3.12/MO/116/2014 tanggal 26 Juni 2014.
  + Perbaikan Jaringan Radio Wireless di DSER1 dan KGPMA tanggal 08 s.d. 08 Juli 2014.
  + Perbaikan Jaringan Radio Wireless di DSER2 dan KSGGI tanggal 10 s.d. 11 Juli 2014.

2). Jaringan Wireless

* Perbaikan Jaringan LAN di DATIM tanggai 03 s.d. 06 Juli 2014 sesuai Memorandum No : DATIM/3.12/M0/I16/2014 tanggal 26 Juni 2014.
* Perbaikan Jaringan Radio Wireless di DSER1 dan KGPMA tanggal 08 s.d. 08 Juli 2014.
* Perbaikan Jaringan Radio Wireless di DSER2 dan KSGGI tanggal 10 s.d. 11 Juli 2014.
* Perbaikan dan penyambungan kabel fiber optic di PHPSG dan KBGTU tanggal 19 s.d. 24 Agustus 2014 sesuai Memorandum Nomor : PHPSG/3.12/MO/01/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan SPD Nomor: 3.00/SPPD/1501/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
* Perbaikan jaringan internet di KGPMA dan PRBTN tanggal 20 s/d 22 Agustus 2014 sesuai Memorandum Nomor : KGPMA/3.12/MO/13/2014 dan SPD Nomor : 3.00/SPPD/1597/2014 tanggal 20 Agustus 2014.
* Perbaikan jaringan internet di KRBTN tanggal 28 s/d 30 Agustus 2014 sesuai SPD Nomor : 3.00/SPPD/1526/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
* Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Tower Triangle di KGPAR, KGPMA, KGMNO, KSDUN, DLAB2, Mess DLAB2, KSKAR, KATOR, PPARO, KSBAR, RSTOR dan PSBAR dari tanggal 01 s.d. 07 September 2014 sesuai SPD Nomor : 3.00/SPPD/1598/2014 tanggal 29 Agsutus 2014.
* Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan di DLAB2, Mess DLAB2, KATOR, RSTOR, KSKAR, PPARO, KSBAR dan PSBAR dari tanggal 08 s.d. 14 September 2014.
* Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan di DLAB2 dan Mess DLAB2 dari tanggal 15 s.d. 17 September 2014 sesuai SPD Nomor : 3.00/SPPD/1731/2014 tanggal 15 September 2014.
* Perbaikan Jaringan Internet di DATIM dari tanggal 24 s.d. 27 September 2014 sesuai memorandum nomor : DATIM/3.12/M0/189/2014 tanggal 22 September 2014 dan SPD Nomor : 3.00/SPPD/1796/2014 tanggal 24 September 2014.
* Pemasangan Kabel fiber optic dan LAN di DSIMA, KDSHU, PSMKI, dan KBGTU dari tanggal 29 s.d. 30 September 2014 sesuai SPD Nomor : 3.00/SPPD/1798/2014 tanggal 24 September 2014

3). Lain-lain

* Pemeliharaan Komputer, Printer, UPS dan Monitor Kebun/ Unit dan Bagian Kantor Direksi, rata-rata masih dalam batas normal.
* Penyempurnaan perangkat Video Conference di KPJAK dari tanggal 02 s.d. 06 Juli 2014 sesuai Memorandum No : KPJAK/3.12/MO/95/2014 tanggal 25 Juni 2014.
* Perbaikan perangkat power back up inverter di KBANG tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2014 sesuai SPPD Nomor: 3.00/SPPD/1526/2014 tanggal 20 Agustus 2014.
* Perbaikan perangkat power back up Inverter di DLAB2 tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2014, sesuai SPD Nomor: 3.00/SPPD/1596A/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
* Pelaksanaan Piket pada hari libur, hari-hari besar dalam upaya pelayanan serta memonitoring stabilitas koneksi jaringan diseluruh Kebun/ Unit dan Kantor Direksi.

D. Evaluasi Pengembangan Transformasi Bisnis

1). Persiapan Sosialisasi BUMN bersih.

2). Distribusi Buku Pemenang Hasil Inovasi/Kreatifitas Tahun 2011 dan Buku Pemenang Hasil Inovasi/Kreatifitas Tahun 2012 s.d. 2014 untuK seiurun unit Kerja PT. Perkebunan Nusantara III dari tanggal 07 Juli s.d. 24 Juli 2014.

3). Pelaksanaan Sosialisasi BUMN Bersih, Whistler Blowing System, Code of Conduct dari tanggal 25 Agustus s.d. 4 September 2014.

4). Koordinasi Tindak lanjut hasil Penilaian BUMN Bersih dan hasil assessment GCG tahun 2013 Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara .... pada tanggal 22 s.d. 26 September 2014.

5). Rekapitulasi pengajuan Inovasi/ Kreatifitas di tingkat Kebun/ Unit.

E. Manajemen Risiko

1). Membuat Portofolio Risiko Spin Off Rumah Sakit Sri Pamela menjadi Anak Perusahaan.

2). Membuat laporan ke Direksi tentang Evaluasi Pengelolaan Risiko di Bagian/ Distrik/ Kebun/ Unit pada Semester 1 Tahun 2014.

3). Mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pelepasan Aset KDSHU ke KISMK pada tanggal 22 Juli 2014.

4). Memenuhi undangan rapat CPO - RFS dengan PT Wilmar, dimana PTPN III sebagai calon penjual harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan CPO - RFS.

5). Mengikuti rapat review struktur organisasi dan jabatan nomenklatur, untuk lebih menertibkan jabatan-jabatan yang ada. Bagian SDM meminta seluruh Bagian untuk melakukan review terhadap struktur organisasinya serta seluruh jabatan yang ada di Bagian tersebut.

6). Mengadakan rapat terkait usulan perubahan proses pengadaan barang dan jasa di PTPN III.

7). Membuat Kajian Analisa Risiko berupa portofolio Risiko tentang harga sewa dan Jual Tanah di KEK Sei Mangkei.

8). Mengikuti Pelatihan "Business Continuity Management" pada tanggal 10 s.d. 12 September 2014 di Bandung dan membuat laporannya.

9). Mengikuti rapat intern Pembahasan Struktur Organisasi Bagian 3.12 pada tanggal 9 September 2014.

10). Mengkompilasi Review Organisasi untuk Bagian TI/TB & MR (CMR).

11). Mengikuti rapat Review Struktur Organisasi dan Nomenklatur dengan Bagian terkait pada tanggal 11 September 2014.

12). Mengikuti rapat pembahasan pasokan listrik dari PLN ke Kawasan Industri Sei Mangkei dengan Bagian 3.13 pada tanggal 22 September 2014.

13). Membuat Laporan Manajemen risiko Kwartal II tahun 2014.

**2.9. Perencanaan dan Pengembangan**

Kegiatan yang dilakukan Bagian Perencanaan dan Pengkajian s/d. Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :



**2.10. Logistik**

Pengadaan Barang dan Jasa (Logistik)

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa s/d Tiwulan ....../20x4 di lingkup PT. Perkebunan Nusantara III, baik di Kantor Direksi maupun di Unit-unit/Kebun, berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi Nomor : 3.12/SKPTS/01/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Edisi VI 2012 dan Nomor : 3.12/SKPTS/09/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penerbitan dan revisi Instruksi Kerja, Surat Keputusan tersebut mengacu kepada:

a. Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. Nomor : SE-122/MK.16/1998 tanggal 3 April 1998 mengenai Pedoman Dasar Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang bersangkutan sepanjang kwalitas dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan, contohnya pengadaan BBM dengan Pertamina, Pupuk dengan Petrokimia, Lori dengan PTPN-IV dan pengadaan Rubber Cowmat dengan Anak perusahaan PT. IKN.

c. Surat Kementerian Negara BUMN R.I.Nomor : S-298/S.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 hal Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Surat Keputusan Direksi Nomor : 3.08/SKPTS/09/2012 tanggal 16 April 2012 mengenai Perubahan Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III.

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, kegiatan pengadaan barang dan jasa secara prinsip dilaksanakan dengan desentralisasi, kepada unit kerja diberi wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang kecuali jenis barang-barang tertentu yang dipandang lebih efektif dan efisien apabila diadakan di Kantor Direksi. Pengadaan barang dimaksud bukan untuk stock tetapi untuk digunakan langsung paling lama disimpan 1 (satu) bulan.

Dalam kegiatan operasional s/d. Triwulan ....../20x4 masih ada ditemui kendala yang belum dapat mendukung secara optimal proses pengadaan barang, antara lain :

- Gejolak pasar yang ditimbulkan akibat krisis finansial global membawa dampak terhadap perubahan dan harga pasar yang tidak menentu.

Beberapa langkah strategis yang telah ditempuh oleh manajemen untuk mengatasi kendala diatas adalah sebagai berikut :

1. Terhadap barang/bahan yang sangat mendesak kebutuhannya digunakan barang/bahan substitusi yang tidak mempengaruhi kualitas produksi.
2. Meningkatkan penguasaan jaringan pasar melalui distributor atau agen-agen yang dihunjuk oleh pihak pabrikan.
3. Meningkatkan survey pasar dalam rangka mendukung kebijakan penetapan harga.

Pengadaan Barang Berdasarkan Golongan Usaha :

PT. Perkebunan Nusantara III selaku BUMN yang mengemban misi sebagai dinamisator perekonomian Daerah, juga telah berperan aktif dalam mendorong aktivitas pengusaha Golongan Kecil Dua (K-2) melalui kegiatan pengadaan barang sebagai berikut :



Pengadaan barang melalui Golongan Usaha Besar persentasenya lebih besar, hal ini disebabkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengadaan BBM dan pupuk tidak dapat dikerjakan oleh Golongan Usaha Kecil.

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang s/d Triwulan ....../20x4 dibanding s/d Triwulan ....../20x3 adalah sebagai berikut :

1. Eksploitasi (Rp.Juta)



1. Investasi dan Modal Lainnya

(Rp. Juta)



* Eksploitasi

Realisasi biaya pengadaan eksploitasi barang lokal s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. …….. milyar sedangkan realisasi biaya pengadaan eksploitasi barang lokal s/d Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. …….. milyar, atau naik sebesar ……..%.

* Investasi

Realisasi biaya pengadaan investasi barang lokal s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. …….. milyar sedangkan realisasi biaya pengadaan investasi barang lokal s/d Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. …….. milyar, atau naik sebesar ……..%.

* Perkembangan harga barang-barang/bahan s/d Triwulan ....../20x4 dibanding s/d Triwulan ....../20x3.

Harga barang-barang/bahan s/d Triwulan ....../20x4 dibandingkan s/d Triwulan ....../20x3 tidak mengalami perubahan yang berarti.

**2.11. Manajemen, Organisasi dan Sistem**

2.11.1. Sekilas tentang Perusahaan

a. Pendirian Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara .... (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 08 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Peleburan Persero PT Perkebunan III, IV, dan V menjadi PT Perkebunan Nusantara .... (Persero). PT Perkebunan Nusantara .... (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Manteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-8331 HT.01.01.Th.96 tanggal 08 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 08 Oktober 1996, tambahan Nomor 8674/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2013 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-52437 tanggal 4 Desember 2013.

b. Visi dan Misi Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara .... telah menetapkan Visi dan Misi sebagai dasar untuk mencapai tujuan perusahaan.

Visi : Menjadi perusahaan agri bisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata-kelola bisnis terbaik.

Misi : 1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinam­bungan.

2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.

3. Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal,

4. Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan ‘imbal-hasil’ terbaik bagi para investor,

5. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis,

6. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan

7. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

Paradigma Bisnis Baru Perusahaan

Untuk mencapai sasaran Visi dan Misi secara optimal, maka PT Perkebunan Nusantara .... melaksanakan Tata Nilai, Paradigma Bisnis Baru, dan Strategi sebagai berikut :

Tata Nilai : 1. Proactvity

Selalu bersikap proaktif, dengan penuh inisiatif dan mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi.

2. Excellence

Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai dengan kompetensi kita.

1. Team Work

Selalu mengutamakan kerjasama tim, agar mampu menghasilkan sinerji optimal bagi perusahaan.

4. Innovation

Selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru.

5. Responsibility

Selalu bertanggung jawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

Paradigma Baru : 1. Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah salah satu keharusan.

2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk memenangkan persaingan.

3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan kebhinekaan.

5. Pengembangan SDM yang terintergrasi untuk membangun Kapital Insani (Human) dan Intelektual yang dibutuhkan perusahaan.

6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan menjadi panutan.

7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.

8. Efektivitas operasional harus didukung oleh Struktur Organisasi yang sederhana dan dinamis.

9. Pemanfaatan Teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif.

10. Keputusan Bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat.

11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas dan penuh tanggung jawab.

12. Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

Strategy : 1. Menjalin dan mengembangkan Hubungan Sinergik yang efektif dengan Mitra Strategik untuk mewujudkan peluang bisnis.

2. Melaksanakan Manajemen Berorientasi Pasar, sensitif terhadap Kecenderungan Industri dan Pergerakan Pasar, dan mencermati Pesaing.

3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kemampu-labaan.

4. Mematuhi aturan-aturan SHE - Safety, Health and Environment Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan.

5. Melaksanakan Keunggulan Operasional agar perusahaan menjadi cost effective.

6. Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan Tata Nilai dan Paradigma Baru.

7. Membangun dan mengimplementasi manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan kinerja.

2.11.2. Manajemen

a. Susunan Dewan Direksi perusahaan pada tanggal ………. 20x4, sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Bagas Angkasa

2. Direktur Pemasaran dan

Perencanaan Pengembangan : Alexander Maha

1. Direktur Keuangan : Erwan Pelawi
2. Direktur Produksi : Tengku Syahmi Johan
3. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Harianto
4. Susunan Dewan Komisaris perusahaan pada tanggal …….. 20x4, sebagai berikut :
   * + 1. Komisaris Utama : Joefly J. Bahroeny
       2. Komisaris : Dahlan Harahap
       3. Komisaris : Sardan Marbun
       4. Komisaris : Subur Budhisantoso
       5. Komisaris : Herry Sebayang
5. Susunan Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal ……. 20x4, sebagai berikut :

Komite Audit :

Ketua : Dahlan Hararap

Anggota : Syamsuddin Lubis

Komite Pemantau Risiko :

* + - 1. Ketua : S. Marbun
      2. Anggota : H. Afrah Yusren

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK-233/MBU/2013 tanggal 29 April 2013 dan Akta No.04 tanggal 08 Mei 2013 dari Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, dengan ini memberhentikan dengan hormat Megananda Daryono sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III dan mengalihkan penugasan kepada Bagas Angkasa yang semula sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III menjadi Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK-275/MBU/2013 tanggal 10 Juni 2013, dengan ini memutuskan memberhentikan dengan hormat Kusumandaru NS sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTP. Nusantara III.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK-402/MBU/2013 tanggal 27 November 2013 dan Akta No.02 tanggal 02 Desember 2013 dari Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, dengan ini memberhentikan dengan hormat Balaman Tarigan dan Rachmat Prawirakusumah masing-masing sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III dan mengangkat Harianto dan Tengku Syahmi Johan masing-masing sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 3.08/SKPTS/R/415/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Jabatan Direktur PT. Perkebunan Nusantara III, dengan ini menetapkan jabatan masing-masing Direktur PTP. Nusantara III sebagai berikut :

1. Nurhidayat sebagai Direktur Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan
2. Erwan Pelawi sebagai Direktur Keuangan
3. Tengku Syahmi Johan sebagai Direktur Produksi
4. Harianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara .... Nomor : SK-159/MBU/09/2014 tanggal 17 Juli 2014, memberhentikan dengan hormat Sdr. Nurhidayat sebagai Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan.

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara .... Nomor : SK-485/MBU/09/2014 tanggal 16 September 2014 mengangkat Sdr. Alexander Maha sebagai anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara .... Nomor : KEP-208/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III tanggal 10 Oktober 2011, diangkat Sdr. Heri Sebayang sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-341/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 dan Akta No. 6 tanggal 15 Oktober 2012 dari Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, diangkat Achiran Pandu Djajanto sebagai wakil komisaris utama Perusahaan. Pengangkatan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-37215 tanggal 17 Oktober 2012.

Pengangkatan Subur Budhisantoso sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Herman Hidayat adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-21/MBU/2013 tanggal 17 Januari 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK-232/MBU/2013 tanggal 26 April 2013 dan Akta No. No. 04 tanggal 08 Mei 2013 dari Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, dengan ini memberhentikan dengan hormat Achiran Pandu Djajanto sebagai Wakil Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III No. SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 dan Akta No.02 tanggal 02 Desember 2013 dari Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, dengan ini memutuskan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III :

1. Achmad Manggabarani sebagai Komisaris Utama
2. Deddy Suardy sebagai Komisaris
3. S. Marbun sebagai Komisaris
4. S. Herry Sucipto sebagai Komisaris

Dan mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT..Perkebunan Nusantara III :

1. Joefly J. Bahroeny sebagai Komisaris Utama
2. S. Marbun sebagai Komisaris
3. Dahlan Harahap sebagai Komisaris

Pada tahun 2013 perusahaan melakukan pemberhentian dan pengangkatan ketua dan anggota-anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/DK/XII/2013 tangga 11 Desember 2013 dan KEP-07/DK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara .... (Persero) Nomor : KEP-03/DK/V....../20X4 18 Agustus 2014, telah mengangkat Sdr. Syamsuddin Lubis sebagai anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

2.11.3. Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara .... Nomor 3.08/SKPTS/15/2014 tanggal 26 Pebruari 2014, tentang Perampingan Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III, bahwa Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara .... terdiri dari 14 Kepala Bagian, 1 Kepala Perwakilan Jakarta, 9 Distrik Manajer, 36 Kebun, 12 Unit PKS, dan 5 Unit Rumah Sakit, 1 Unit Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK), 1 Unit Pabrik Kernel Sei Mangkei (PKSMK), 1 Unit Pembangkit Listrik Biomassa Sawit Sei Mangkei (PLSMK) dan 1 Unit Sawit Sapi.

**2.12. Sumber Daya Manusia**

2.12.1. Urusan SDM

PTPN-III didalam meningkatkan kompetensi karyawan serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan edukatif serta mendukung tercapainya sasaran dan tugas Bagian SDM, maka telah disusun program pelatihan yang meliputi Kursus, seminar, workshop, dan studi banding/magang dan lain-lain.

Realisasi jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan baik secara internal maupun eksternal s/d. Triwulan ....../20x4 :



2.12.2. Admi Sumber Daya Manusia

* ...(kenaikan/penurunan)... Golongan Pengabdian pada Triwulan ....../20x4

Sesuai SKPTS yang diterbitkan pada Triwulan ....../20x4 kepada Karyawan yang akan memasuki masa pensiun telah diberikan ...(kenaikan/penurunan)... Golongan Pengabdian berupa ...(kenaikan/penurunan)... Golongan atau ...(kenaikan/penurunan)... Berkala Istimewa kepada …… (………………) orang Karyawan Pimpinan dan ………… (……………………..) orang Karyawan Pelaksana.

* ...(kenaikan/penurunan)... Golongan Penghargaan pada Triwulan ....../20x4

Sesuai SKPTS yang diterbitkan pada Triwulan ....../20x4 kepada Karyawan yang meninggal dunia diberikan ...(kenaikan/penurunan)... Golongan Penghargaan berupa ...(kenaikan/penurunan)... Golongan atau ...(kenaikan/penurunan)... Berkala Istimewa kepada ………. (……………………..) orang Karyawan Pelaksana.

* Mutasi/Alih Tugas/Promosi pada Triwulan ....../20x4

Dalam rangka penyegaran dan mengisi formasi jabatan yang lowong dalam Triwulan ....../20x4 dilakukan mutasi/alih tugas dan promosi :

Karyawan Pimpinan :

- Mutasi/Alih Tugas sebanyak : …. orang

- Mutasi Antar Bagian dan Kebun/Unit : …. orang

- Promosi : ….. orang

Karyawan Pelaksana :

- Mutasi/Alih Tugas sebanyak : .… orang

- Mutasi Antar Bagian dan Kebun/Unit : …..orang

- Promosi : …. orang

* Kekuatan Tenaga Kerja s/d. Triwulan ....../20x4



* Punishment

Pelanggaran disiplin kerja perusahaan/PKB pada Triwulan ....../20x4 akibat dari penyalah gunaan wewenang jabatan, melalaikan pelaksanaan tugas sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun lingkungan kerja, sanksi/hukuman telah diberlakukan berupa surat tegoran, peringatan, skorsing, degradasi dan PHK terhadap Karyawan di Kantor Direksi dan Kebun/Unit kerja, dengan rincian sebagai berikut :

* Surat Tegoran

- Karyawan Pelaksana = ……….orang

- Karyawan Pimpinan = ……… orang

Jumlah = ……… orang

* Surat Peringatan

- Karyawan Pelaksana = ……… orang

- Karyawan Pimpinan = ……… orang

Jumlah = ……… orang

* Surat Sekorsing

- Karyawan Pelaksana = ………. orang

- Karyawan Pimpinan = ………. orang

Jumlah = ………. orang

* Surat Pemutusan Hubungan Kerja

- Karyawan Pelaksana = ………. orang

- Karyawan Pimpinan = ………. orang

Jumlah ……….. orang

**Jumlah keseluruhan pelanggaran**

**Disiplin kerja = ………… orang**

2.12.3. Kesejahteraan Karyawan Triwulan ....../20x4



2.12.4. Pensiun

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-372 NB.1/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan berdasarkan Aktuaria per 31 Desember 2012 bahwa Iuran Normal bagi Karyawan Golongan IA - IVD sebesar 11,68% (6% beban Pribadi dan 5,68% beban Perusahaan) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Gaji Pokok Tahun 2011.

Iuran Normal dan Iuran Tambahan Karyawan PTPN III Triwulan ....../20x4



Program Pensiun Iuran Pasti DPLK BNI

Sesuai Surat Edaran Direksi Nomor : 3.08/SE/263/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan surat Perjanjian antara PT. Perkebunan Nusantara III dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. BNI Nomor : 3.08/SPJ/10/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pemanfaatan Layanan Program Pensiun, Karyawan yang diterima tmt. tahun 2009 dan seterusnya diikutsertakan dalam Program Pensiun Iuran Pasti pada DPLK BNI, serta karyawan lama yang besaran iurannya sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan dan menjadi beban karyawan.

Iuran PPIP DPLK BNI PTP. Nusantara III Triwulan ....../20x4



Pembayaran Santunan Hari Tua Triwulan ....../20x4



Jumlah Karyawan yang Pensiun/Meninggal Dunia Triwulan ....../20x4



Iuran Jamsostek Triwulan ....../20x4



Iuran Asuransi Jiwasraya Triwulan ....../20x4



Iuran Asuransi Bumiputera 1912 Triwulan ....../20x4



2.12.5. Assessment Centre

Kegiatan yang dilaksanakan Assessment Centre selama Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



**2.13. Umum**

a. Memantau dan memonitor jalannya pendidikan pada Tingkat Madrasah serta pendidikan Tingkat Lanjutan (SLTP) di Gunung Para dan Sei Karang.

b. Menerima dan memproses permohonan Mahasiswa/Siswa yang mengadakan Riset/PKL untuk ditempatkan di Bagian, Kebun/Unit PT. Perkebunan Nusantara III s/d. Triwulan ....../20X4 sebagai berikut :

- Mahasiswa = …………. orang

- SMK = …………. orang

Jumlah = …………. orang

c. Memproses surat-surat permohonan bantuan dari pihak ke III.

1. Pelaksanaan Safari Ramadhan 1435 H/2014 M ke Kebun/Unit PT. Perkebunan Nusantara III dari tanggal 14 s/d 18 Juli 2014.
2. Pelaksanaan acara Buka Puasa Bersama dan Penutupan Safari Ramadhan di Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi Medan tanggal 22 Juli 2014.
3. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1435 H/2014 M di Halaman Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi Medan tanggal 28 Juli 2014.
4. Pelaksanaan Halal Bil Halal 1435 H/2014 M Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III di Tiara Convention Hall Medan tanggal 16 Agustus 2014.
5. Pelaksanaan Perayaan Hari Ulang Tahun RI. Ke 69 Karyawan Kantor Direksi Medan tanggal 15 Agustus 2014.
6. Pelaksanaan Do’a Selamat Calon Haji/Hajjah Keluarga Besar PTP. Nusantara III Tahun 2014 di Aula Kelapa Sawit Kandir Medan tanggal 28 Agustus 2014.
7. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III di Kebun/Unit tanggal 22 s/d 30 September 2014.
8. Pelaksanaan Kegiatan Pertandingan Sepak Bola memperebutkan Piala Soeratin di Stadion Bina Marga Rantau Prapat tanggal 18 s/d 21 September 2014.
9. Pelaksanaan Kegiatan Pertandingan Sepak Bola memperebutkan Piala Menpora di Stadiuon Gong Seng dan Ciracas Jakarta tanggal 18 s/d 21 September 2014.
10. Persiapan Pelaksanaan Sholat Idul Adha dan Ibadah Qurban di Kantor Direksi Medan.

2.13.1. Urusan K3

* Membuat laporan hasil monitoring dan pemeriksaan peralatan K3 dan Poteksi Kebakaran, APAR serta Hydrant System/Portable Hydrant untuk wilayah Distrik/Kebun/ Unit DSER2, DSER1, DSIMA, DASAH dan DLAB3.
* Menindaklanjuti/memproses permintaan Selang Hydrant untuk Distrik, Kebun/Unit PSMKI, KSDDP, KRBTN, KMMDA, PSMTI, PTORA, PPARO, PSBAR.
* Menindaklanjuti Temuan Audit Survellance III RSPO & SCCS PSMKI dan rantai pasoknya serta Audit Sertifikasi RSPO & SCCS PKSMK.
* Membuat Perkiraan Harga atas DPBB Pengadaan Tabung APAR Baru DSER1, KGPMA, KMSTN, KTARA dan Selang Hydrant KMMDA, KSDUN, KSGGI, KRPPT yang telah disetujui Direksi dan diproses di Bagian Komersil.
* Memproses persetujuan kekurangan anggaran APD untuk Kebun se Wilayah DSER1 dan Kebun Rambutan tahun 2014.
* Meminta data dan memproses permintaan kebutuhan APD tahun 2014 Bagian Komersil (Instalasi Belawan) dan Bagian Hukum.
* Meminta data Tabung APAR yang sudah digunakan kepada seluruh Distrik dan seluruh Kebun/Unit.
* Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan Peralatan K3 dan Poteksi Kebakaran, APAR serta Hydrant System/Portable Hydrant untuk wilayah Distrik/Kebun/Unit DLAB3, DLAB2, DLAB1 dan DTAPS pada tanggal 04 s/d 20 Agustus 2014.
* Menindaklanjuti/memproses permintaan Mesin Portable Hydrant dan membuat Perkiraan Harga yang telah disetujui Direksi dan diproses di Bagian Komersil untuk Kebun/Unit KHPSG, KRPPT, KBUTU, KAMBT, KSKAR, KPARO, KSBAR, Instalasi Belawan.
* Membuat laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Peralatan K3 dan Poteksi Kebakaran, APAR serta Hydrant System/Portable Hydrant untuk wilayah Distrik/Kebun/Unit DLAB3, DLAB2, DLAB1 dan DTAPS.
* Melaksanakan rapat Kerja Penerapan SMK3/OHSAS – 18001 yang dihadiri oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Kantor Direksi PTPN III Medan pada tanggal 08 September 2014.
* Melaksanakan sosialisasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) secara efektif dan efisien bagi Petugas Keamanan di seluruh Distrik pada tanggal 10 s/d 23 September 2014.
* Menindaklanjuti/memproses permintaan Mesin Portable Hydrant untuk Kebun/Unit KTARA, KLAJI, KGMNO, KTORA, RSANS.

2.13.2. Kesehatan

* 1. Memeriksa tagihan dari Rumah Sakit Rujukan, Apotek, Optical dan Dokter Rujukan PT. Perkebunan Nusantara III serta membuat Permintaan Pembayaran tagihannya.
  2. Menerbitkan Kartu Berobat bagi Anak Karyawan Kebun yang melanjutkan pendidikan di Medan dan Pensiunan PT. Perkebunan Nusantara III beserta batihnya Triwulan ini sebanyak 400 kartu.
  3. Membuat Surat Jaminan ke Rumah Sakit diluar Propinsi (RS. Jantung Harapan Kita, RS. Kanker Dharmais, RS. PGI Cikini, RS. Cipto Mangunkusumo - Jakarta).
  4. Membuat Surat Jaminan ke KPJ, LPP Jogyakarta dan PT. Perkebunan Nusantara lainnya.
  5. Merekapitulasi biaya Perobatan/Perawatan Karyawan dan Pensiunan Kandir beserta Batihnya yang dilakukan di Rumah Sakit, Apotek, Optical dan Dokter Rujukan PT. Perkebunan Nusantara III, penggantian Kwitansi Triwulan ini dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp.8.465.669.485,-.
  6. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PTPN III dengan Drg. Adelina Darwis, Rumah Sakit Islam Malahayati, Apotik Varia, Apotik Nusatiga dan Apotik Sutomo dalam hal Pelayanan Kesehatan untuk Karyawan dan Pensiunan PTPN III beserta batihnya.

2.13.3. Rumah Tangga

Pekerjaan Teknik yang dilaksanakan :

* + - * 1. Penggantian Tangki Air di Gedung Baru II, 3.09, 3.11, 3.12, dan 3.13 di Kantor Direksi, Surat Perintah Kerja No. 3.07/SPK/33/2014, tanggal 14-04-2014, Naskah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 3.09/BA-STP/12/IV/2014, tanggal 14-4-2014.
        2. Perbaikan Panel Sinkron Travo Listrik di Kantor Direksi, Surat Perintah Kerja No. 3.07/SPK/34/2014, tanggal 14-04-2014, Naskah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 3.09/BA-STP/II/IV/2014, tanggal 21-04-2014.
        3. Bongkar Pasang dan Perbaikan AC Kantor, Mess dan Belawan, Surat Perintah Kerja No. 3.07/SPK/50/2014, tanggal 22-04-2014. Naskah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 3.09/BA-STP/19/V/2014, tanggal 20-05-2014.
        4. Perbaikan Penggantian Spare part AC di Kantor Direksi, Surat Perintah Kerja No. 3.07/SPK/l33/2014, tanggal 21-07-2014, Naskah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 3.09/BA-STP/29/V....../20X4, tanggal 13-08-2014.

**2.14. Satuan Pengawasan Intern**

2.14.1. Struktur Organisasi Bagian Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan SKPTS Nomor : 3.08/SKPTS/15/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Perubahan/Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III, maka Struktur Organisasi Bagian Satuan Pengawasan Intern diubah menjadi :

* Kepala Bagian
* Pengawas Wilayah
* Ketua Tim
* Staf Pengawas
* Staf Urusan Administrasi

Perubahan struktur ini dimaksud untuk lebih meningkatkan Peranan Bagian Satuan Pengawasan Intern didalam pelaksanaan program Transformasi Bisnis sesuai dengan peran Bagian Satuan Pengawasan Intern sebagai Konsultan, Katalisator, Assurance dan Watchdog.

2.14.2. Personil Bagian Satuan Pengawasan Intern

Jumlah personil Karyawan Pimpinan di Bagian Satuan Pengawasan Intern PT Perkebunan Nusantara .... berdasarkan RKAP 20x4 berjumlah 24 orang. sedangkan Personil Karyawan Pimpinan yang nyata (realisasi) berjumlah 22 orang dan kekurangan sebanyak 2 orang.

Susunan Personil Bagian Satuan Pengawasan Intern diuraikan sebagai berikut :



2.14.3. Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

* Target dan Realisasi Laporan Hasil Audit (LHA)

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai PKPT tahun 20x4 target LHA sampai dengan Triwulan ....../20X4 sebanyak 90 LHA, sedangkan realisasi sebanyak 86 LHA dengan rincian sebagai berikut :



Realisasi LHA s/d Triwulan ....../20x4 dibawah RKAP disebabkan karena adanya pemeriksaan khusus pada Triwulan I dan mengikuti pendidikan/seminar di Sei Karang dan Jakarta.

2.14.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendapatkan tenaga pemeriksa yang berkemampuan, mempunyai integritas, wawasan dan keahlian (kompetensi) dilakukan sebagai berikut :

* Mengikutsertakan personil Bagian Satuan Pengawasan Intern dalam Seminar dan Lokakarya baik yang diselenggarakan oleh FKSPI maupun lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
* Pendidikan Reguler Internal Audit

Jumlah Karyawan Pimpinan yang telah mengikuti pendidikan profesi internal auditor dan telah memperoleh sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) sampai dengan Triwulan ....../20X4 sebanyak 12 orang, yang sedang mengikuti pendidikan sertifikasi QIA sebanyak 5 orang dan yang belum mengikuti pendidikan 5 orang.

2.15. Keuangan dan Akuntansi

2.15.1. Keuangan

1. Cash Flow

Kondisi Cash Flow per …………. 20x4 (Induk Perusahaan) sebesar Rp.926.722 juta, jika dibanding dengan per ……….. 20x3 sebesar Rp. ……….. juta, berada dibawah sebesar Rp. ……….. juta atau ………..%.

Upaya dan kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan cash flow perusahaan antara lain :

1. Mengawasi pengeluaran biaya operasional dengan cara menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO).
2. Menyusun kembali skala prioritas investasi.
3. Menginventarisasi pekerjaan dengan mengklasifikasikannya kedalam 3 (tiga) katagori yaitu :

* Sangat urgent (Harus dilaksanakan)
* Urgent (dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan melihat kondisi keuangan.
* Tidak urgent (Dibatalkan)

4). Mengingatkan semua DM/Kebun/Unit agar melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan plafon Modal Kerja yang telah disepakati bersama.

2. Pajak

Saldo Pajak Dibayar Dimuka dan Hutang Pajak s/d Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



2.15.2. Akuntansi

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dibidang Akuntansi dalam Triwulan ....../20x4 dilaksanakan :

1. Menyusun Laporan Manajemen Triwulan ....../20x4 untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai bahan untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menyusun Laporan Laba/Rugi Bulanan per Kebun/Unit untuk disampaikan kepada Direksi, Distrik Manager dan Manajer sebagai bahan analisa untuk pengambilan keputusan.
3. Pengawasan dan evaluasi Aktiva dalam rangka mengendalikan assets perusahaan.
4. Pelaksanaan kegiatan/proses akuntansi yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.
5. Pelaksanaan kegiatan verifikasi yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.
6. Pelaksanaan kegiatan administrasi penjualan, persediaan hasil produksi, persediaan bahan baku dan pelengkap dan alat-alat kantor, administrasi keuangan, aktiva tetap dan investasi.
7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan serta SMK3 di lingkungan kerja Bagian Akuntansi.
8. Mencatat semua transaksi keuangan di Kantor Direksi melalui Jurnal yang digunakan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS.
9. Membuat Laporan Manajemen Interim Bulanan, Triwulan dan Semester pada tahun 2014 dengan tujuan memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

**2.16. Investasi**

2.16.1. Rutin

Percapaian realisasi investasi s/d Triwulan ....../20x4 terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20X4 dapat diuraikan sebagai berikut :



Pencapaian Investasi s/d Triwulan ....../20x4 terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ………..%, dapat diuraikan sebagai berikut :

* Investasi Tanaman Ulang/Konversi/Tanaman Baru (TU/TK/TB)

Pencapaian Investasi TU/TK/TB terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ………..%, hal ini disebabkan pekerjaan TU/TK/TB masih dalam tahap pelaksanaan sehingga beban investasi belum dibukukan seluruhnya (dibukukan berdasarkan tahapan kemajuan pekerjaan).

* Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Pencapaian Investasi TBM terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ………..%, hal ini disebabkan pekerjaan TBM masih dalam tahap pelaksanaan sehingga beban investasi belum dibukukan seluruhnya (dibukukan berdasarkan tahapan kemajuan pekerjaan).

* Investasi Non Tanaman

Pencapaian investasi non tanaman terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ………..%, hal ini disebabkan pekerjaan non tanaman masih dalam tahap pelaksanaan, sehingga beban investasi belum dibukukan seluruhnya (dibukukan berdasarkan tahapan kemajuan pekerjaan).

* Investasi Lain-lain

Pencapaian Investasi lain-lain terhadap RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar ………..%, hal ini disebabkan investasi di KSO dan Proyek Peumakmu Gampong dalam tahap pelaksanaan dan pekerjaan pengembangan perkebunan serta penyertaan belum terlaksana, sehingga beban investasi belum dibukukan seluruhnya (dibukukan berdasarkan tahapan kemajuan pekerjaan).

2.16.2. Penyertaan

Penyertaan PT. Perkebunan Nusantara III pada perusahaan lainnya sampai dengan Triwulan ....../20x4 dapat diuraikan sebagai berikut :



Penyertaan pada anak perusahaan dan perusahaan asosiasi sampai dengan Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :

1. PT. Industri Karet Nusantara

PT Industri Karet Nusantara (PT IKN) merupakan hasil pelaksanaan pemisahan (spin off) unit Industri Hilir Karet Perusahaan. Pendirian PT. IKN telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN Republik Indonesia dengan surat No. S-346/MBU/2005 tanggal 26 Oktober 2005, PT IKN didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 4 April 2006 dari Syafnil Gani SH, M. Hum., notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-12809 HT.01.01.TH. 2006 tanggal 4 Mei 2006. Kepemilikan saham Perusahaan pada PT IKN sebesar Rp 114.774 juta (99,99%). PT IKN bergerak dibidang industri hilir karet.

1. PT. ESW Nusantara Tiga

PT ESW Tiga Nusantara (PT ESW) didirikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. S-189/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan izin perubahaan investasi saham Nomor : S-351/MBU/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

PT. ESW didirikan dengan akta pendirian No. 2 tanggal 2 Juli 2005 dari Syafril Gani SH, M. Hum., notaris di Medan. PT ESW bergerak dibidang industri pengolahan dan pemasaran produksi tepung kelapa sawit. Kepemilikan saham Perusahaan pada PT ESW sebesar Rp 19.571 juta (74,11%).

1. JIC Wood Company Limited

Pada tanggal 21 Maret 2005, Perusahaan mengadakan Joint Venture Agreement dengan Beijing ES Wood Enviromental Protection Science and Technology Ltd, Eastern Supply Industrial Ltd, dan Guangcai Energy Resourcing (Far East) Company Ltd untuk mendirikan JIC Wood Company Ltd (JICW) yang berkedudukan di Hong Kong SAR, Republik Rakyat Cina. Rencana pembentukan JICW telah mendapat persetujuan Menteri BUMN Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Persetujuan No. S-189/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pembentukan Perusahaan JIC Wood Company Ltd dan PT ESW Nusantara Tiga. JICW direncanakan akan bergerak di bidang industri panel board/ kayu sintetis serta bidang-bidang usaha lainnya.

Perusahaan telah melakukan investasi di JICW sebesar 1.200.000 lembar saham setara dengan Rp 11.682 juta pada tanggal 14 Juni 2005. Pada tahun 2009, perusahaan membentuk penyisihan penurunan nilai investasi sebesar Rp. 9.664 juta karena JICW belum menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan RUPS luar biasa perusahaan mengakuisisi saham Pihak Eastern Suppy Industrial Limited sebesar 600.000 lembar saham sehingga saham perusahaan menjadi 1.800.000 lembar saham atau 60%.

1. PT. Mitra Ogan

Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Persetujuan No. S-512/MK.013/1988 tanggal 20 Mei 1988 dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.529/95/II/1988 tanggal 29 Pebruari 1988, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO). PT PMO didirikan berdasarkan akta No.170 tanggal 19 Desember 1988 dari Imas Fatimah,SH, notaris di Jakarta. Kegiatan utama PT PMO adalah dibidang usaha pertanian dan perkebunan serta perdagangan dan distribusi di wilayah Batu Raja, Sumatera Selatan. PT PMO telah memulai kegiatan usaha komersial sejak tahun 1995.

Sesuai dengan akta Nomor : 42 tanggal 4 Oktober 2005 dari B.R.AY.Mahyastoeti Notonagoro,SH., notaris di Jakarta, tentang penegasan kembali peningkatan modal disetor dengan mengkonversi dana cadangan umum yang berasal dari saldo laba sampai dengan tahun 2004, sehingga jumlah investasi saham Perusahaan meningkat dari Rp 22.780 juta menjadi Rp 35.130 juta dan kepemilikan Perusahaan terdilusi dari 35,62% menjadi 26,42%

1. PT. Tiga Mutiara Nusantara

Berdasarkan persetujuan dari Menteri BUMN Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Persetujuan Nomor : S-483/MBU/2004 tanggal 16 September 2004, Perusahaan bersama dengan PT Yeo Aie Resourses Berhad dan PT Innex Tripanca Corporation mendirikan PT Tiga Mutiara Nusantara (PT TMN). PT TMN didirikan berdasarkan akta No.21 tanggal 27 September 2004 dari Djaidi, SH, notaris di Medan. Perusahaan mempunyai Investasi saham pada PT TMN sebanyak 394.800 saham atau sebesar Rp 3.654 juta (30%).

Kegiatan usaha PT TMN di Medan, Sumatera Utara. PT TMN bergerak dibidang pengolahan kayu karet menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, melakukan pembuatan dan desain, produsen dan perancangan perabot, dan perdagangan. PT TMN telah memulai kegiatan usaha komersial sejak tahun 2006

1. PT. Sarana Agro Nusantara (PT. SAN)

PT Sarana Agro Nusantara (PT SAN) didirikan berdasarkan akta No. 11 tanggal 9 Nopember 1993 dari Kasim, SH., notaris di Medan dengan nama PT Delitama Indonesia (PT DTI). Berdasarkan akta No. 8 tanggal 11 September 2000 dari Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar SH., notaris di Medan, diputuskan untuk mengubah nama PT DTI menjadi PT SAN, meningkatkan modal dasar, dan menggabungkan PT Sarana Sawitindo Utama (PT SSU) ke dalam PT SAN. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. C-18 HT.01.04.Tahun 2001 tanggal 2 Januari 2001.

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT SAN No. 6 tanggal 13 September 2005 dari Syafnil Gani SH, M.Hum, notaris di Medan, struktur kepemilikan modal PT SAN diubah menjadi PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-33 143 HT.01.04 th 2005 tanggal 14 Desember 2005. Selanjutnya, modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 21.203 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dengan susunan pemegang saham adalah Perusahaan sebanyak 9.541 saham atau sebesar Rp 9.541 juta (45%) dan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebanyak 11.662 saham atau sebesar Rp 11.662 juta (55%).

PT. SAN menyediakan pelayanan jasa pompa dari tangki minyak sawit dan gula tetes, jasa gudang untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi, inti sawit dan tembakau serta menyediakan pelayanan jasa ekspedisi untuk semua jenis komoditi tersebut.

1. PT. Bio Industri Nusantara

PT Bio Industri Nusantara (PT BIN) merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, PTPN VII, dan PTPN VIII (Persero) yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan No. S.289/14-BUMN/1999 tanggal 8 Juni 1999. Perjanjian kerjasama perusahaan patungan dibuat dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 10 tanggal 10 Nopember 1999 dari Tien Norman Lubis notaris di Bandung, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-06812HT.01.01.TH.2001 tanggal 28 Agustus 2001. Perusahaan mempunyai Investasi saham pada PT BIN sebanyak 1.925 saham atau sebesar Rp 1.925 juta (25%). PT BIN bergerak dibidang usaha pupuk hayati dengan merek “EMAS”. PT BIN telah memulai kegiatan usaha komersial sejak tahun 2003.

1. Hamburg Indonische Import Gesellshahft Mbh (" Indoham")

Investasi saham pada Hamburg Indonesische Import Gesellshahft mbh ("Indoham") sesuai dengan surat eks BKU PNP Jakarta No. 871WK.BK/A/U/175 tanggal 14 April 1975 dan Nomor 1554/ASS.PP/A/U/78 tanggal 30 Agustus 1978 serta sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Indoham tanggal 6 Agustus 1997 di Departemen Pertanian, Jakarta. Jumlah investasi saham tersebut sebesar DEM 28.000 atau setara dengan EUR 14.350.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan meningkatkan investasi saham di Indoham sebesar EUR 100.039 atau setara dengan Rp 529 juta melalui konversi piutang hubungan istimewa. Peningkatan tersebut dilakukan berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Indoham tanggal 24 Agustus 1999

1. PT. Bursa Berjangka Jakarta

Berdasarkan akta No.26 tanggal 19 Agustus 1999 dari Abdullah Ashal SH., Perusahaan mempunyai investasi saham pada PT Bursa Berjangka Jakarta sebanyak 1 saham dengan nominal sebesar Rp 400 juta (3,45%). Investasi tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai salah satu upaya memperluas pangsa pasar

1. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara

Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009, disetujui perubahan Kantor Pemasaran Bersama menjadi Perseroan Terbatas. Perusahaan bersama dengan PTPN I sampai dengan XIV (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) mendirikan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN). PT KPBN didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 16 Nopember 2009 dari N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., notaris di Jakarta.

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN RI No : S-500/MBU/2011 tanggal 28 September 2011 dan keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara surat No : 05/KPBN/PS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, perusahaan memperoleh penambahan investasi saham pada PT KPBN berasal dari konversi asset milik PTPN I s/d XIV sebanyak 5.884 saham sehingga investasi saham pada PT. KPBN sebanyak 6.884 lembar (7,14%).

1. PT. Riset Perkebunan Nusantara

Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. S-713/MBU/2009 tanggal 30 September 2009, disetujui pendirian PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) sebagai bentuk transformasi dari Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Perusahaan bersama dengan PTPN I sampai dengan XIV (Persero) dan PT RNI (Persero) mendirikan PT RPN berdasarkan akta No. 01 tanggal 20 Nopember 2009 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, notaris di Jakarta.

Berdasarkan Risalah RUPS luar biasa PT. RPN tanggal 26 Maret 2012, perusahaan menambah saham dengan menyetor modal sebesar Rp. 13.556 juta pada tanggal 8 Mei 2012, sehingga investasi saham pada PT RPN sebesar 13.606 lembar saham atau (12,95%).

**2.17. Pajak, Deviden dan Devisa**

2.17.1. Perpajakan

Pajak dibayar dimuka s/d. Triwulan ....../20x4 sebesar Rp………………. dan s/d. Triwulan ....../20x3 sebesar Rp. ………………. dengan rincian sebagai berikut :



Hutang Pajak

Hutang pajak s/d. Triwulan ....../20x4 sebesar Rp………….. dan s/d. Triwulan ....../20x3 sebesar Rp…………….. dengan rincian sebagai berikut :



PT Perkebunan Nusantara .... sebagai Badan Hukum mempunyai kewajiban kepada Negara berbentuk pajak, dan besarnya pajak perusahaan dalam Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



2.17.2. Devisa

Hasil devisa yang berasal dari hasil penjualan ekspor s/d Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :



**2.18. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

1). Program Kemitraan

Realisasi penyaluran Dana Program Kemitraan Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. ……………. terhadap …… UKM. Sedangkan total dana yang disalurkan sejak digulirkannya Program Kemitraan s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp……………. kepada 6.286 UKM.

* Penyaluran Program Kemitraan Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :



* Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana Program Kemitraan Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :



* Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan per Pemko dan Pemkab. s/d Triwulan ....../20x4 sebagai berikut :



* Realisasi Penyaluran Program Kemitraan per sektor s/d Triwulan ....../20X4 adalah sebagai berikut :



2). Program Bina Lingkungan

Realisasi penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Triwulan ....../20x4 sebesar Rp…………… Total dana yang disalurkan sejak digulirkannya Program Bina Lingkungan s/d. Triwulan ....../20x4 sebesar Rp………………..

* Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Program Bina Lingkungan s/d. Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



* Realisasi Program Bina Lingkungan

Realisasi Program Bina Lingkungan Per Pemko/Pemkab s/d. Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



* Program Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan per sektor s/d. Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



3). Program Bina Lingkungan RKAP PTPN III

Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Program Bina Lingkungan RKAP PTPN III s/d. Triwulan ....../20x4 adalah sebagai berikut :



**BAB III. KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN**

**3.1. Kerjasama sesama BUMN**

Jasa perbankan yang dipakai untuk mengoperasikan kegiatan perusahaan yaitu :

1. PT Bank Mandiri
2. PT Bank Rakyat Indonesia
3. PT Bank Negara Indonesia
4. PT Bank Bukopin

Jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan yaitu :

1. Pertamina (pengadaan BBM)
2. PT. Mega Eltra (pengadaan pupuk)
3. PT. Krakatau Engineering (pekerjaan konstruksi)
4. PT. Wijaya Karya (pekerjaan konstruksi)

**3.2. Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain**

Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Perkebunan Nusantara I untuk pengelolaan Kebun Karang Inong, Kebun Julok Rayeuk Selatan,Pabrik Pengolahan Karet dan Program Peumakmu Gampong.

**3.3. Entitas Anak**

* PT. Industri Karet Nusantara (PT IKN)
* Kepemilikan saham sebesar 114.774 lembar saham atau senilai Rp.114.774 juta (99,99%)
* Bergerak dalam bidang usaha Rubber Articles, Rubber Thread dan Resiprene.
* PT. IKN diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. ESW Nusantara Tiga
* Kepemilikan saham sebesar 195.707 lembar saham atau senilai Rp.19.571 juta (74,11%)
* Bergerak dalam bidang usaha Pembuatan serbuk kayu dari batang kelapa sawit.
  + - * PT ESW Nusantara Tiga diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. JIC Wood Company Limited
* Kepemilikan saham sebesar 1.800.000 lembar saham (60,00%).
* Bergerak dalam bidang usaha Industri Panel Wood.
* PT. JIC Wood Company Limited diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
  1. **Perusahaan Asosiasi**
* PT. Sarana Agro Nusantara (PT SAN)
* Kepemilikan saham sebesar 9.541 lembar saham atau senilai Rp.9.541 juta (45%).
* Bergerak dalam bidang pelayanan jasa pompa dari tangki minyak sawit dan gula tetes, jasa gudang untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi, inti sawit dan tembakau serta menyediakan pelayanan jasa ekspedisi untuk semua jenis komoditi tersebut
* PT SAN diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Perkebunan Mitra Ogan
* Kepemilikan saham sebesar 3.513 lembar saham atau senilai Rp.35.130 juta (26,42%).
* Bergerak dalam bidang usaha Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, Pertanian dan Industri Perdagangan.
* PT. Perkebunan Mitra Ogan diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Tiga Mutiara Nusantara
* Kepemilikan saham sebesar 394.800 lembar saham atau sebesar Rp.3.654 juta (30%).
* Bergerak dalam bidang usaha industri furniture berbahan baku kayu karet.
* PT. Tiga Mutiara Nusantara diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Bio Industri Nusantara
* Kepemilikan saham sebesar 1.925 lembar saham atau senilai Rp.1.925 juta (25%).
* Bergerak dalam bidang usaha Industri Pupuk, Konsultan dan Perdagangan.
* PT. Bio Industri Nusantara diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* Hamburg Indonische Import Gesselshahft. Mbh (Indoham)
* Kepemilikan saham sebesar EUR 14.350 (5,60%).
* Bergerak dalam bidang usaha Pemasaran Ekspor Pertanian Indonesia (Khususnya produk PTPN).
* Hamburg Indonische Import Gesselshahft. Mbh (Indoham) diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN)
* Kepemilikan saham sebesar 6.884 lembar saham atau senilai Rp.6.884 juta (7,14%).
* Bergerak dalam bidang Perdagangan, Pemasaran dan Pengolahan Komoditas Agro Industri.
* PT. KPBN diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Bursa Berjangka Jakarta
* Kepemilikan saham sebesar 1 lembar saham atau senilai Rp.400 juta (3,45%).
* Bergerak dalam bidang usaha Bursa Berjangka Komoditi.
* PT. Bursa Berjangka Jakarta diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.
* PT. Riset Perkebunan Nusantara
* Kepemilikan saham sebesar 13.606 lembar saham atau senilai Rp.13.606 juta (12,95%).
* Bergerak dalam bidang usaha Jasa (Penelitian dan Konsultan), Pertanian dan Perdagangan.
* PT. Riset Perkebunan Nusantara diharapkan dapat memberikan laba yang optimal bagi perusahaan.

**BAB IV. KINERJA DISTRIK MANAGER**

1. Produksi

Pencapaian produksi sampai dengan Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



1. Produktivitas Per Ha

Pencapaian produktivitas per ha sampai dengan Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



1. Beban Produksi

Pencapaian Beban produksi per kg excl. penyusutan s/d. Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



1. Laba Sebelum PPh

Pencapaian Laba sebelum PPh s/d. Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



1. Kinerja Distrik Aceh Timur (KSO)

Kinerja Distrik Aceh Timur s/d Triwulan ....../20x4 dibanding dengan RKAP s/d Triwulan ....../20x4 diuraikan sebagai berikut :



**BAB V. Penutup**

* 1. Kesimpulan

Setelah dievaluasi secara seksama Laporan Manajemen Perusahaan s/d Triwulan ....../20x4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

* Penilaian kinerja perusahaan s/d Triwulan ....../20x4 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 dan Keputusan RUPS PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014, tanggal 24 Desember 2013, diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai skor Aspek Keuangan = 64,10
2. Nilai skor Aspek Operasional = 12,60
3. Nilai skor Aspek Administrasi = 15,00

Total Nilai Skor = 92,10

Berdasarkan hasil penilaian diatas, tingkat kesehatan perusahaan s/d Triwulan ....../20x4 dikategorikan Sehat-AA (Double A), dengan total skor 92,10.

* Laporan posisi keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Entitas Anak (Konsolidasi) per .............. 20x4 ditutup dengan total Aset dan Liabilitas/Ekuitas sebesar Rp. .............. milyar, dibanding RKAP per .............. 20x4 sebesar Rp. .............. milyar berada diatas Rp. .............. milyar atau ..............% dan dibanding per .............. 20x3 sebesar Rp. .............. milyar mengalami ...(kenaikan/penurunan)... sebesar Rp. .............. milyar atau ..............%.
* Realisasi laba PT. Perkebunan Nusantara III (Konsolidasi) sebelum PPh sampai dengan Triwulan ....../20x4 mencapai Rp. .............. milyar berada diatas RKAP s/d Triwulan ....../20x4 sebesar Rp. .............. milyar atau ..............%.
* Penerimaan Devisa dari penjualan produksi s/d Triwulan ....../20x4 sebesar US $ .............. atau setara Rp. .............. juta.
* Perusahaan juga melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
  1. Permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemegang saham.

Permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemegang saham antara lain mengenai okupasi terhadap areal HGU kebun yang dilakukan oleh masyarakat dengan backing oknum tertentu.

Modus operandi okupasi tersebut dilakukan dengan pengerahan massa dan di dukung oleh aparat ataupun LSM.

Demikian laporan hasil kegiatan usaha PT Perkebunan Nusantara III sampai dengan Triwulan ....../20x4 disampaikan untuk dapat dimaklumi.